

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN  
PEMERINTAH ATAS PENDIDIKAN,  
KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
INDONESIA PERIODE 1969-2009**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DESI DWI BASTIAS**  
**NIM. C2B006020**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Desi Dwi Bastias  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006020  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH ATAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1969-2009**  
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, SE., Msi.

Semarang, Agustus 2010

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, SE., Msi)

NIP. 197107251997022001

pdfMachine

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama penyusun : Desi Dwi Bastias  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006020  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN  
PEMERINTAH ATAS PENDIDIKAN,  
KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR  
TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI INDONESIA PERIODE 1969-  
2009**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Agustus 2010**

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, SE., Msi. (.....)
2. Johanna Maria Kodoatie, SE., MEc., PhD (.....)
3. Banatul Hayati, SE., Msi. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Desi Dwi Bastias, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil dari tulisan saya sendiri ini. bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2010

Yang membuat pernyataan

(Desi Dwi Bastias)

NIM: C2B006020

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

"if There is will, There is a way"

"man jadda waJada"

SKRIPSI ini DIPERSEMBAHKAN UNTUK IBUNDA tercinta

atas doa dan kasih sayangnya

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## ABSTRAKSI

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969-2009. Pengeluaran pemerintah atas infrastruktur diwakilkan dengan variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtut waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan.

Model analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM), dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang. Model kesalahan mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisa fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Selain itu model ini mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel *time series* yang tidak stasioner dalam ekonometri.

Hasil regresi dengan model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, *Error Correction Model*

## ABSTRACT

The objective of this research is analyzing how government's expenditure on education, health and infrastructure influence economic growth for period of 1969-2009. Government expenditure on infrastructure is represented by government's expenditure variables on housing and government's expenditure variables on transportation. The government's expenditures on education, health and infrastructure are basically investments on economic growth. The effect of the development on those three sectors has no direct impact but it requires several periods to feel the aftereffects. There are *time lags* as the government issues the state budget for those three sectors, for the effect of the policy, a study using a long time series is needed. The research with such time series would help to observe the impact of government's expenditure on those three sectors to the economic growth. Government investment in education, health and infrastructure will lead to the improving quality of human resources and material infrastructures; it will also spur economic investment as a result. Economic investment will affect the economic growth, because the number of the capital available for development.

The research model used to analyze the hypothesis of this research was the Error Correction Model (ECM). The model was expected to explain the short and long term behavior. Error model may include various variables in analyzing the long-term economic phenomenon and assessing the consistency of the empirical models using economic theory. In addition, this model is able to find a solution to the problem of non stationary time series variables in econometrics.

The regression results of the ECM model mentioned above indicated that in the short term, the variable of government's expenditures on transportation is the only variable that is significantly influential on economic growth. The government's expenditures on education, health and housing do not significantly affect the economic growth. While in the long term, the variables of government's expenditure on housing and transportation significantly affect the economic growth, whereas the variable of government's expenditure on education and health do not affect economic growth.

Keyword: economic growth, government expenditure, education, healthy, infrastructure, Error Correction Model.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur panjatkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang diberi judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. HM. Chabachib, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, Msc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs.R. Mulyo Hendarto M.SP selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang diberikan.
4. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
5. Bapak Firmansyah SE, M.Si, Ibu Johanna Maria Kodoatie SE.,MEc.,PhD., dan Ibu Hastarini Dwi Atmanti, SE, M.Si terima kasih atas diskusinya.
6. Segenap dosen-dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan dan kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

7. Ibu tercinta atas semua doa, semangat dan segala kasih sayangnnya serta ayah yang selalu saya ingat dan sayangi.
8. Kakak tersayang Sri Wahyuni Bastias terima kasih atas dorongan semangat yang tiada henti, keluarga besar eyang di Magetan yang telah menjadi rumah kedua untuk pulang.
9. Keluarga besar UKM INKAI Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengalaman dan pengaruh yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada para Sensei, Senpai dan Kohei, sahabat-sahabat: Astra, Haru, Wuluh, terima kasih atas semua perhatian dan keceriaan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan IESP 2006 : tina, ririn, dipo-adit,dimas, fajar ,mamet , kaka, ase, priyo, ilum, rezal, abra, selly, manda, yuki, deede, ari, nia, santi, suryo, edwin, atika, tika, osti, rodo, een, feby, isom, angggit, kucir. Seluruh teman-teman IESP 2006 terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama empat tahun ini.
11. Keluarga besar Kos Ibu Saiman Kertanegara IV/9, my lovely sista :mba een(kong), mba nungki, mba tata, mba uci, mba mei, fitri, maya, eni, ririn,fanny, lily, dian, stela, weni dll,terima kasih telah menganggap saya sebagai saudara.
12. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semarang, Agustus 2010

Penulis

( Desi Dwi Bastias)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.2 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian.....	20
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	23
2.1.3.1 Kebijakan Fiskal.....	23
2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro.....	26
2.1.3.3 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro.....	27
2.1.4 Gambaran Umum APBN.....	30
2.1.4.1 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	33
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan.....	38
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan.....	39
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur.....	40
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Kerangka Pemikiran.....	46

	2.4 Hipotesis.....	49
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	51
	3.2 Jenis dan Sumber Data .....	53
	3.3 Metode Pengumpulan Data .....	55
	3.4 Metode Analisis.....	55
	3.4.1 <i>Error Correction Model</i> .....	59
	3.4.2 Uji penyimpangan Model Asumsi Klasik .....	71
	3.4.3 Metode Pengujian Hipotesis .....	75
	3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
	4.1 Definisi Objek Penelitian .....	79
	4.1.1 Kondisi Makroekonomi .....	79
	4.2 Deskripsi Variabel.....	85
	4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	85
	4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan.....	88
	4.2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan .....	91
	4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur.....	92
	4.3 Analisis Data .....	94
	4.3.1 Uji Stasioneritas .....	95
	4.3.2 Uji Kointegrasi .....	97
	4.3.3 Uji Hasil Estimasi Model Jangka Panjang.....	98
	4.3.3.1 Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Panjang .....	98
	4.3.3.2 Pengujian Statistik Analisis Regresi Jangka Panjang.....	102
	4.3.4 Uji Hasil Estimasi Model Jangka Pendek .....	105
	4.3.4.1 Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Panjang .....	105
	4.3.4.2 Pengujian Statistik Analisis Regresi Jangka Panjang.....	108
	4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan .....	110
	4.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	112
	4.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	115

4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	118
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Keterbatasan.....	122
5.3 Saran.....	123
<b>Daftar Pustaka</b> .....	124
<b>Lampiran</b> .....	125

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 1966-2008.....	2
Tabel 1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1969-2009.....	6
Tabel 1.3 Proporsi Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Transportasi Tahun 1969-2009.....	10
Tabel 2.1 Struktur APBN Berimbang.....	32
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Sumber Data.....	55
Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004-2008 .....	84
Tabel 4.2 Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji PP .....	96
Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi .....	97
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka Panjang Metode Error Correction Model.....	98
Tabel 4.5 Uji Jarque-Berra Model Jangka Panjang .....	99
Tabel 4.6 Uji Breusch-Godfrey Serrial Correlation Model Jangka Panjang .....	100
Tabel 4.7 Auxilliary Regression Jangka Panjang .....	101
Tabel 4.8 Koefisien Korelasi Antar Variabel.....	102
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka Pendek Metode Error Correction Model.....	105
Tabel 4.10 Uji Jarque-Berra Model Jangka Pendek.....	106
Tabel 4.11 Uji Breusch-Godfrey Serrial Correlation Model Jangka Pendek.....	106
Tabel 4.12 Auxilliary Regression Jangka Pendek.....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.....	28
Gambar 2.2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	49
Grafik 4.1 Perkembangan Inflasi Indonesia Periode 1990-2008 .....	83
Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1969-2009 .....	87
Grafik 4.3 Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan Tahun 1969-2009 .....	88
Grafik 4.4 Pengeluaran Pemerintah Atas Kesehatan Tahun 1969-2009.....	91
Grafik 4.5 Pengeluaran Pemerintah Atas Perumahan Tahun 1969-2009 .....	92
Grafik 4.6 Pengeluaran Pemerintah Atas Transportasi Tahun 1969-2009 .....	94
Gambar 4.1 Skema Perubahan Tahun Anggaran Fiskal Menjadi Tahun Kalender .....	95

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1992).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang belum mencapai kondisi *steady state* dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena guncangan.

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 1966-2008**

Tahun	Pertumbuhan PDB	Tingkat Inflasi
<b>1966</b>	2,85	650%
<b>1980</b>	5,2	30,99%
<b>1998</b>	-13,13	78%
<b>2008</b>	6,39	11,9%

Sumber: BPS, Departemen Keuangan, World Bank, diolah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai guncangan (*shock*). Guncangan tersebut seperti krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1966, menyebabkan *hyper inflation* hingga mencapai 650 persen. Selanjutnya guncangan yang membuat perekonomian Indonesia terganggu adalah krisis ekonomi tahun 1998 yakni inflasi 78 persen dan PDB turun sekitar 11 persen. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat kondisi perekonomian Indonesia mengalami resesi meskipun tidak separah krisis ekonomi tahun 1966.

Perekonomian dunia pada tahun 2008 tengah berada dalam keadaan resesi (resesi ekonomi global) yang dipicu oleh gejolak finansial di Amerika Serikat. Krisis finansial ini tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga negara-negara di seluruh dunia. Dampak krisis finansial di Indonesia ditandai dengan turunnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga membuat otoritas perdagangan bursa saham menutup perdagangan untuk sementara. Tingkat inflasi mencapai 11,9 persen merupakan dampak yang terjadi di akhir tahun. Pemerintah sudah dapat mengantisipasi

keadaan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif aman yaitu sebesar 6,38 persen. Indonesia lebih siap bertahan pada krisis kali ini dengan belajar dari pengalaman krisis-krisis sebelumnya.

Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi. Pihak swasta biasanya mengalokasikan sumber daya yang dimiliki melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien di dalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam *private market* (Samuelson dan Nordhaus, 2005). Pemerintah akan masuk dan menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar jika pihak swasta dan individu-individu tidak bersedia memperbaiki keadaan dan mengeluarkan biaya.

Pemerintah dapat melakukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini

menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggaran belanja dengan penerimaan. Perbedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik. Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada saat sebelum diundangkannya UU No. 17/2003. UU No.17/2003 mengenalkan sistem *unified budget* sehingga tidak lagi ada perbedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1969-2009**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Jenis Pengeluaran	1969/ 1970	1979/ 1980	1989/ 1990	1999/ 2000	Belanja negara	2009
<b>I. Pengeluaran rutin</b>	216,5	3.445,9	24.331,1	137.155,5	<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	716.400,00
<b>1. Belanja Pegawai / Pensiun</b>	93,1	1.419,90	6.201,50	33.569,1	1. Belanja pegawai	1 40.197,7
<b>2. Belanja Barang</b>	61,0	569,0	1.701,60	11.039,0	2. Belanja Barang	91.731,2
<b>3. Subsidi Daerah Otonom</b>	44,1	669,9	3.566,40	19.497,6	3. Belanja Modal	71.991,5
<b>4. Bunga / Cicilan Hutang</b>	14,4	684,1	11.938,70	44.810,9	4. Pembayaran Bunga Utang	1 01.657,8
<b>5. Lain-lain</b>	3,9	718,9	9.22,9	3.919,1	5. Subsidi	166.701,6
					6. Belanja Hibah	-
					7. Bantuan Sosial	78.973,1
					8. Belanja Lain-lain	6 5.123,5
<b>II. Pengeluaran Pembangunan</b>	118,1	4.014,2	13.129,9	82.448,3	<b>II. Belanja Untuk Daerah</b>	3 20.691,0
<b>1. Program Pembangunan</b>	92,8	2.697,9	5.412,2	52.448,3	1. Dana perimbangan	296.952,4
<b>2. Bantuan Proyek</b>	25,3	1.316,3	8.422,1	30.000,0	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	23.738,6
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>334,6</b>	<b>7.460,1</b>	<b>40.461,0</b>	<b>219.603,8</b>		<b>1.037.067,3</b>

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Departemen Keuangan RI, diolah.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah secara nominal dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan pengeluaran pembangunan pada periode 1969/1970, namun pada periode berikutnya yaitu 1979/1980 pengeluaran rutin lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan. Perbedaan dalam pengeluaran tersebut dikarenakan pada periode 1979/1980 situasi politik dan pemerintahan lebih stabil sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak ke program pembangunan. Pengeluaran rutin terpaut jauh lebih besar dari pada pengeluaran pembangunan pada periode 1989/1990 dan 1999/2000. Pengeluaran untuk pengeluaran pembangunan lebih tinggi atau setidaknya sebanding dengan pengeluaran rutin pemerintah. Kondisi pemerintahan yang lebih stabil pada periode tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memaksimalkan pembangunan, namun yang terjadi adalah pengeluaran rutin pemerintah yang semakin meningkat.

Perubahan struktur anggaran dalam pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 2004 dimana tidak lagi memisahkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi kedalam delapan pos. Format baru APBN ini menggunakan rincian belanja negara menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan dan lain-lain. Belanja negara menurut

fungsi ini merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama yang merupakan rincian dari pengeluaran pembangunan per sektor.

Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Perumahan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik karena dengan rumah yang layak dapat mendukung kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia. Jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembanguana. Menurut Deni Friawan (2008) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, infrastruktur dalam bentuk perumahan dan transportasi merupakan cukup penting untuk menunjang kehidupan masyarakat.

**Tabel 1.3**  
**Proporsi Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan,**  
**Perumahan dan Transportasi Tahun 1969-2009**

Tahun	Proporsi Pengeluaran Pemerintah (%)			
	Pendidikan	Kesehatan	Perumahan	Transportasi
<b>1969</b>	3,08	1,64	0,84	9,12
<b>1974</b>	2,98	1,25	0,43	6,21
<b>1979</b>	6,08	2,18	1,30	8,68
<b>1984</b>	9,05	2,43	2,43	8,66
<b>1989</b>	3,72	0,99	1,41	5,68
<b>1994</b>	4,40	1,42	1,23	6,92
<b>1999</b>	3,40	1,83	1,28	3,85
<b>2004</b>	6,01	2,86	6,39	2,20
<b>2009</b>	10,40	2,57	2,18	4,79

Sumber: Nota Keuangan dan APBN

Berdasarkan Tabel 1.3 selama tahun 1969 hingga 2009 proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi berubah-ubah. Jumlah proporsi pengeluaran pemerintah terbanyak terdapat pada sektor transportasi dan terendah pada sektor kesehatan. Proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan berkisar antara 3-4 persen sejak tahun 1969 hingga 1999 kecuali pada tahun 1979 dan 1984. Pada tahun 2004 proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan mulai meningkat seiring dengan ketentuan Undang-undang yang mensyaratkan pengeluaran pemerintah minimal sebesar 10 persen dari APBN. Proporsi pengeluaran pemerintah atas kesehatan hanya sebesar satu hingga dua persen saja, demikian pula dengan pengeluaran pemerintah atas perumahan.

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan..

Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap negara yang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) menemukan tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengeluaran atas kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan pengeluaran pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Antonio Estache

(2007) meneliti tentang hubungan antara pengeluaran publik dengan pertumbuhan ekonomi pada negara kaya. Hasilnya adalah hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk negara kaya dengan sektor publik yang luas. Suleiman Abu-Daber dan Aamer S (2004) mengamati pengeluaran pemerintah untuk sektor sipil dan militer serta pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan arah kausalitas diantara variabel tersebut di Negara Mesir, Israeil dan Syria. Dan hasilnya pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir. Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari Negara yang menjadi sample penelitian hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García (2006). Di Indonesia Jamzy Zodik (2006) meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dan hasilnya adalah pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki kesimpulan yang beragam.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang menyangkut pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang sangat penting bagi proses pembangunan. Pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek melainkan baru akan terasa dalam jangka panjang.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda atas hubungan pengeluaran pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Hasil dan bukti berbeda pada negara maupun daerah. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah akan tergantung dengan kondisi negara. Kondisi Indonesia sebagai negara sedang berkembang tentunya akan berbeda dengan negara maju. Pengeluaran-pengeluaran pembangunan di negara sedang berkembang banyak dialokasikan untuk

pembangunan sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Penelitian sebelumnya belum ada yang mencermati pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah atas infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

1.3.1 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-2009
- b. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-2009
- c. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas Infrastruktur yang terbagi dalam perumahan dan transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-2009

### 1.3.2 Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBN.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah atas fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

#### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan perkembangan pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

#### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Berbeda pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik dari segi struktur output, input, perubahan dalam tehnik produksi, sikap dan perilaku sosial serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa dan perkembangan infrastruktur.

Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Todaro,2006) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit.

Musgrave (Musgrave,1989) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (human capital)

dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.
3. Kemajuan teknologi, terdapat tiga klasifikasi yaitu:
  - 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral
  - 2) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja
  - 3) Kemajuan teknologi yang hemat modal

### **2.1.2 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian**

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 1999; h.56) yaitu :

1. Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian.

Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara–negara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.

2. Peranan distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil–hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya , kesempatan dan hasil–hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap negeri acap kali tidak setara, baik di antara wilayah–wilayah negara yang bersangkutan maupun diantara sektor–sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil–hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir “pihak” tertentu. Daya tawar (*bargaining position*) antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisi lain ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber–sumber pendapatan

lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional.

Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh , berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya : atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.

Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai

contoh dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya.

### 2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

#### 2.1.3.1 Kebijakan Fiskal

Menurut William A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel makroekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit.

Kebijakan fiskal penstabil otomatis atau disebut juga stabilisator terpasang menurut Lipsey (1990) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan *outonomous* pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus

bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Tiga bentuk penstabil otomatis yang utama adalah sebagai berikut :

### 1. Pajak

Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan disposable yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan mengkonsumsi marginal tertentu dari pendapatan disposable, pajak langsung mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marginal dari pendapatan nasional.

### 2. Pengeluaran pemerintah

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidak-stabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja

merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian

### 3. Transfer pemerintah

Transfer pemerintah contohnya berupa jaminan sosial, jaminan kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan sebagai stabilisator terpasang cenderung menstabilkan pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang.

Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang

memadai. Jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono,1992:92)

### **2.1.3.2 Pengeluaran pemerintah secara mikro**

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar (Walter Nicholson,2002). Menurut Guritno (1997) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor mengenai barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga faktor–faktor produksi

### 2.1.3.3 Pengeluaran pemerintah secara makro

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu Wagner dan pasangan ahli ekonomi Peacock dan Wiseman. Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989) adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

Sejalan seperti yang dikatakan Musgrave, menurut Wagner (Guritno M, 1997) jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut

$$\frac{P_R P P_1}{P P K_1} < \frac{P_R P P_2}{P P K_2} < \dots < \frac{P_R P P_n}{P P K_n} \quad (2.1)$$

Dimana :

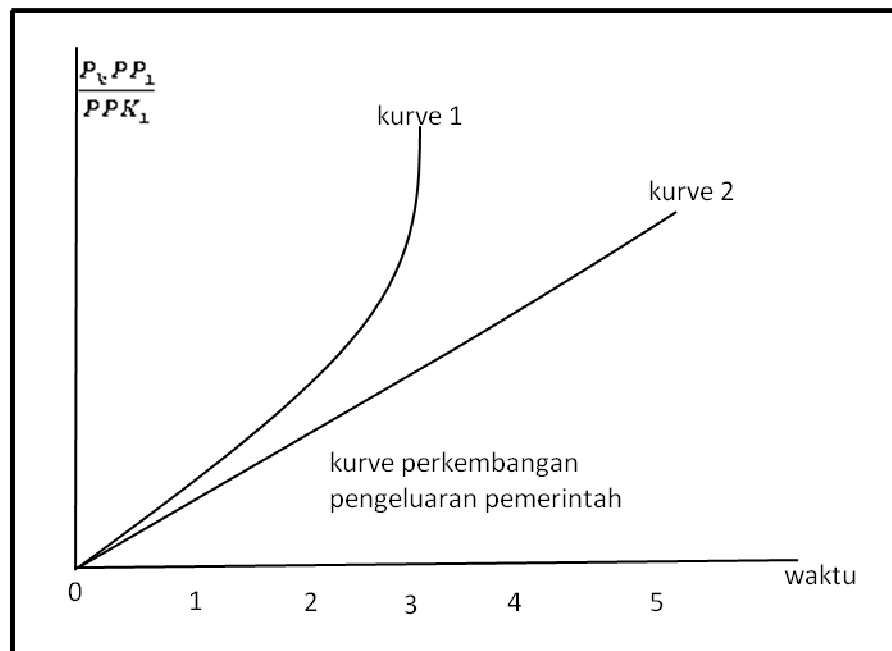
$P_kPP$  : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah pendapatan

1,2, ... n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner yang ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial ditunjukkan oleh kurva 1.

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner**



Sumber : Guritno Mangkoesobroto, 1993: h.172

Peacock dan Wiseman (Guritno,1993) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah.

pdfMachine

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

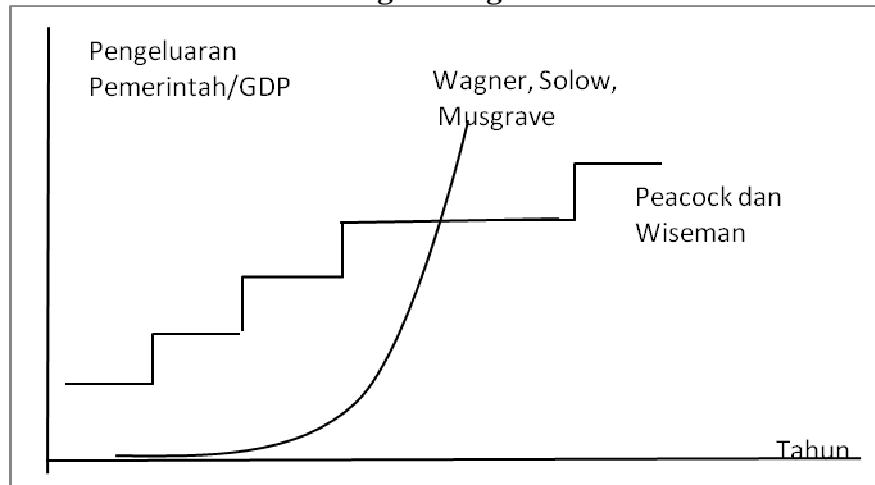
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

**Gambar 2.2**  
**Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**



Sumber : Guritno Mangkoesoebroto,1993; h.175

#### 2.1.4 Gambaran Umum APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai alat pengelolaan perekonomian negara. Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan upaya untuk mulai menyusun pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23C dalam Perubahan ketiga yaitu : "hal-hal lain mengenai keuangan negara ditetapkan melalui undang-undang". Di mulai sejak tahun 1950-an dirumuskan APBN, namun saat itu fungsinya hanya sebagai perhitungan sementara untuk memberikan patokan sebagai dasar pembuatan APBN di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1960 APBN menganut sistem berimbang dan dinamis yang menggantikan APBN dengan sistem Moneter

pada jaman Orde Lama. Bentuk APBN sistem moneter menyatukan Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa. APBN berimbang dan dinamis terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk membiayai belanja pembangunan.

Menurut Frans Seda (2009; h.3) dasar hukum dalam penyusunan APBN adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara (*Indische Comptabiliteitswet*) yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Menurut UU/ICW ini, struktur APBN dari sisi penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri (perpajakan) dan dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja modal. Dengan demikian, APBN berimbang ala ICW adalah pendapatan pajak dihasilkan dari belanja rutin ditambah belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Struktur APBN Berimbang**

<b>Penerimaan Negara</b>	<b>Pengeluaran Negara</b>
<b>1. Pendapatan dan pajak</b>	1. Belanja rutin
<b>2. Pendapatan nonpajak</b>	2. Belanja transfer (Belanja untuk subsidi dan transaksi sosial lain)
<b>3. Penerimaan pembangunan (Pendapatan dari bantuan/pinjaman/utang luar negeri)</b>	3. Belanja Pembangunan

Sumber: Frans Seda, 2009; h.6

APBN berimbang dan dinamis mengubah seluruh struktur APBN eks ICW. Salah satunya adalah mengubah pelaksanaan dari ketentuan kas yang daitur dalam Undang-Undang ICW. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa semua pendapatan negara harus masuk kas negara pada hari yang sama. Pada akhir tahun anggaran, sisa anggaran di kas menjadi hangus.

Paska pemerintahan orde baru dimulai dengan adanya krisis yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Selama masa krisis, APBN dalam periode 1998/1999-2000 menghadapi tekanan yang cukup berat akibat membengkaknya beban pengeluaran negara serta menyusutnya penerimaan negara. Penyusutan APBN Tahun Anggaran 1998/1999 juga tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Namun dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari berbagai perkembangan di dalam dan di luar negeri. Dalam hal ini kondisi perekonomian nasional yang sejak pertengahan tahun 1997

berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional. Melalui ketetapan dalam APBN 2000, maka RAPBN 2001 masa berlakunya dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini telah memuat pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2001 selain mengikuti standar internasional juga diselaraskan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut.

Mulai tahun 2005 pemerintah menerapkan format baru yang didalamnya belanja negara tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah seperti pada format lama. Khusus untuk belanja pemerintah pusat, perubahan-perubahan pada format baru ini adalah melaksanakan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*) dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan serta mereklasifikasi rincian belanja. Sementara itu belanja untuk daerah tidak mengalami perubahan format.

#### **2.1.4.1 Klasifikasi pengeluaran pemerintah**

Menurut Suparmoko (1994;h.78), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas

Macam–macam pengeluaran pemerintah seperti:

1. Pengeluaran yang *self liquiditng* sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa–jasa/barang–barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek–proyek produktif
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan–keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Pengeluran yang tidak termasuk *self liquiditing* dan tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan

kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen dan sebagainya.

4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak- anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalm dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang : berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang) ; angsuran dan utang pemerintah ; serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik , yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mempunyai batasan yang tidak jelas. Sebagai contoh , berbagai macam upah dan gaji tambahan yang menurut logika awam termasuk pengeluaran rutin oleh pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi sebagai berikut:

1. Pembedaan antara Pengeluaran atau Belanja Rutin dan Pengeluaran atau Belanja Pembangunan
  - a. Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja rutin terdiri atas Belanja Pegawai, yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dengan segala macam tunjangan. Belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik. Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
  - b. Belanja pembangunan, adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik-dpiritual
2. Pembedaan antara *current account* atau *current expenditure* dengan *capital expenditure* atau *capital account* .
  - c. *current expenditure* atau *current budget* (anggaran rutin), yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari

termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan.

d. *Capital expenditure* atau *capital budget* (belanja pembangunan), yaitu rencana untuk pembelian *capital* (tetap).

3. Perbedaan *Obligatory Expenditure* dengan *Optional Expenditure* antara *Real Expenditure* dengan *Transfer Expenditure* dan antara *Liquidated Expenditure* dengan *Cash Expenditure*.

e. *Obligatory Expenditure* atau pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang bersifat wajib harus dilakukan agar efektifitas pelaksanaan pemerintah dapat terselenggara sebaik-baiknya.

f. *Optional Expenditure* atau pengeluaran opsional adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba –tiba dibutuhkan.

g. *Real Expenditure* atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa.

h. *Liquidated Expenditure* adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui oleh DPR. Semula dalam RAPBN setelah mendapat pengesahan menjadi APBN.

i. *Transfer Expenditure* adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa , jadi tidak ada *direct quid pro quo*

j. *Cash Expenditure* adalah pengeluaran yang telah sungguh–sungguh dilaksanakan berupa pembayaran–pembayaran konkrit.

### 2.1.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah.

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Menurut E.Setiawan (2006) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2.1.6 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (E.Setiawan, 2006).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara

signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

### **2.1.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur**

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa

infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan , mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan

investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan resiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang, dan pembangunan.

### **2.1.8 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun internasional telah banyak dilakukan, antara lain:

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditures on Education, Welfare and Defense, Donald N dan Shuanglin, 1993	Data cross section 47 negara dalam 10 tahun dan 58 negara dalam 11 tahun. Menggunakan estimasi persamaan yang diturunkan dari fungsi produksi agregat	Tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada semua kasus. Tingkat pertumbuhan pengeluaran kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu kasus tetapi tidak signifikan pada semua kasus. Tingkat pertumbuhan pengeluaran pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu subset Negara-negara tertentu tetapi insignifikan untuk Negara lainnya.
2.	Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Government, Antonio Estache,2007	Dengan menggunakan regresi linear berbasis panel data. Data yang digunakan 1981-2000 pada 26 daerah di Swiss.	Hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tsb hanya dapat diterapkan untuk Negara kaya dengan sektor publik yang luas. Sedangkan Negara sedang berkembang lebih berorientasi mengembangkan ukuran pemerintah untuk perlindungan hak kepemilikan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara lain
3.	Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria, Suleiman Abu-Daber dan Aamer S,2003	Menggunakan Standard Granger Causality dan Error Correction Model(ECM). Data yang digunakan adalah Mesir (1975-1998),Israel (1967-1998) dan Syria (1973-1998)	Pengeluaran pemerintah dibagi kedalam pengeluaran sipil dan pengeluaran militer. Dan hasilnya pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir
4.	Government Spending and economic growth in the European union Countries :An empirical Approach, Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García,2006	Model regresi menggunakan panel data 15 Negara- Negara Eropa tahun 1994-2000	Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari Negara yang menjadi sample penelitian. Untuk Negara-negara maju seperti di Eropa terdapat hubungan yang positif.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

5.	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia Jamzani Sodik, 2007	GLS ( <i>General least Square</i> ) panel data periode 1993-2003 26 propinsi di Indonesia, menguji pengaruh variabel investasi swasta, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja dan tingkat keterbukaan.	Variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000
6.	Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Ari Widodo, 2010	Moderated Regression Analysis (MRA) dan Analisis Jalur (Path Analysis) menganalisis IPM dalam kaitannya dengan hubungan antar pengeluaran sektor publik terhadap kemiskinan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	IPM berperan sebagai variabel <i>pure moderating</i> dan juga sebagai variabel <i>intervening</i> dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik tidak berpengaruh langsung terhadap IPM maupun kemiskinan. Pengeluaran pemerintah sektor publik tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

1. Donald N dan Shuanglin (1993) kaitannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesejahteraan (mengacu pada sektor kesehatan) serupa dengan yang digunakan dalam penelitian ini
2. Antonio Estache (2007) meneliti tentang ukuran pemerintah yang diwujudkan dengan pengeluaran pemerintah pada sektor publik dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya penelitian ini yang mengkaji tentang pengeluaran pemerintah disektor publik yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi
3. Suleiman Abu-Daber dan Aamer S (2003) menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah atas keamanan (militer) terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ECM
4. Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García (2006) meneliti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara Eropa. Kesimpulan yang diperoleh adalah hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sampel penelitian. Seperti halnya penelitian ini yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
5. Jamzani Sodik (2007) *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. Penelitian Jamzadi Sodik

(2007) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu studi kasus yang sama dan membahas mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

6. Adi Widodo (2010) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah sektor publik seperti yang menjadi pembahasan penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam hal ini terbagi dalam perumahan dan transportasi. Pada tahap selanjutnya peran pemerintah semakin berkurang dan peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran untuk aktivitas sosial. Melalui pengeluaran pemerintah pemerintah dapat memberikan kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi.

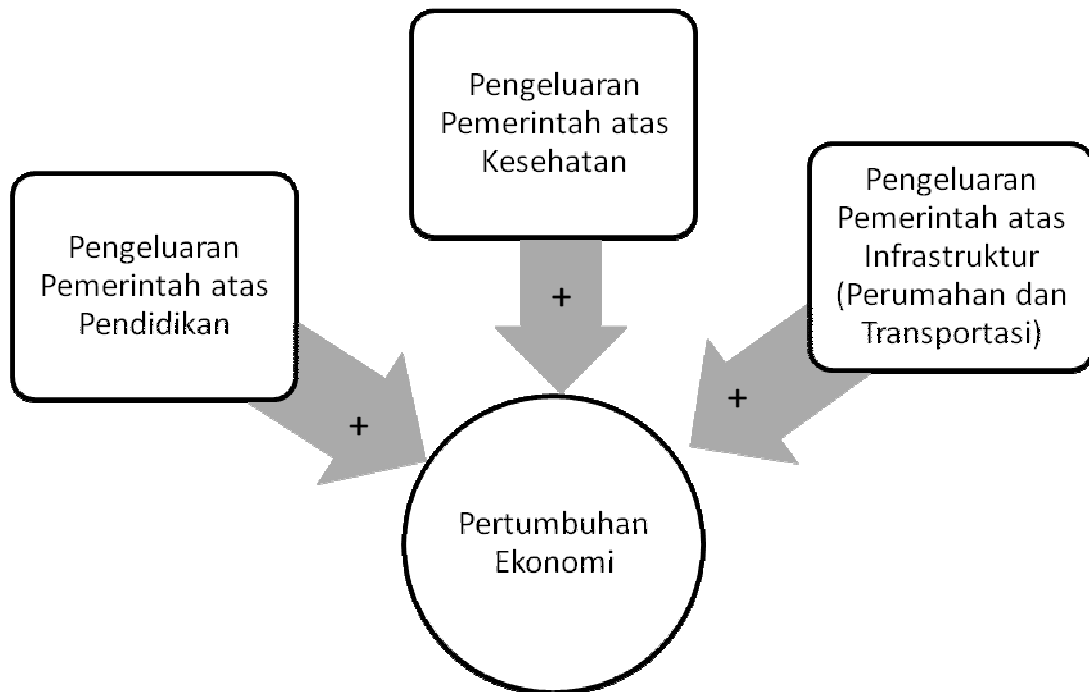
Saat ini Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan dimana perbaikan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Perbaikan kualitas sumber daya manusia, menurut Mankiw dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pembangunan sektor-sektor tersebut dapat direalisasikan pemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dalam ketiga sektor tersebut pada jangka panjang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kemudian akan meningkatkan efisiensi produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor yang dianggap penting. Sektor-sektor fundamental yang menjadi saluran pengeluaran pemerintah adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sektor-sektor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus negara yang diteliti. Negara-negara Eropa misalnya lebih banyak meneliti pengeluaran pemerintah atas kesejahteraan, pendidikan, dan pertahanan. Serupa juga dengan negara-negara Timur Tengah yang rawan perang, pengeluaran pemerintah terhadap sektor pertahanan keamanan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Donald N dan Shuanglin (1993) membahas pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesejahteraan dan keamanan diberbagai negara maju dan negara sedang berkembang. Hasil yang didapat adalah sektor pendidikan dan keamanan berpengaruh positif dan sektor kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Widodo (2010) menjelaskan mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh adalah pengeluaran pemerintah sektor publik seperti yang menjadi pembahasan penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan.

Sampai saat ini sangat sedikit penelitian ilmiah dengan studi kasus Indonesia yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah atas sektor fundamental pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil-hasil penelitian terdahulu masih sangat beragam mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dalam sektor publik terutama sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori–teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sangat sementara.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

1. Diduga pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969 – 2009
2. Diduga pengeluaran pemerintah atas kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969 – 2009
3. Diduga pengeluaran pemerintah atas perumahan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969 – 2009
4. Diduga pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969 – 2009
5. Diduga pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969 – 2009

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai variabel dependen, sedangkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah atas pendidikan, pengeluaran pemerintah atas kesehatan dan pengeluaran pemerintah atas perumahan, pengeluaran pemerintah atas transportasi.

##### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y), merupakan variabel yang digambarkan dengan nilai konstan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tahun dasar 2000. Variabel ini menggunakan satuan Milyar Rupiah.
2. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan (E) merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan didekati dengan jumlah pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 1969-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2009 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pendidikan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Milyar Rupiah.
3. Pengeluaran pemerintah atas kesehatan (H) merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Periode pengamatan 1969-2009. Pengeluaran

pemerintah untuk kesehatan didekati dengan jumlah pengeluaran pembangunan untuk sektor kesehatan dan keluarga berencana pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 1969-2003. Kemudian selanjutnya tahun 2004-2009 diwakili dengan belanja negara menurut fungsi kesehatan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Milyar Rupiah.

4. Pengeluaran pemerintah atas perumahan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor perumahan. Sektor perumahan merupakan salah satu variabel yang menjelaskan sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur sendiri sebenarnya tidak disebutkan secara implisit dalam APBN namun sektor infrastruktur pada penelitian ini terdiri dari sektor penyedia perumahan (R) dan transportasi (T). Kedua sektor tersebut memiliki bagian tersendiri dalam anggaran pembangunan APBN yang tidak disatukan, namun dilihat dari sifat anggarannya merupakan bagian dari infrastruktur. Variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dihitung dalam satuan milyar Rupiah dan dengan periode pengamatan 1969-2009.
5. Pengeluaran pemerintah atas transportasi merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor transportasi. Sektor transportasi merupakan salah satu variabel yang menjelaskan sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur sendiri sebenarnya tidak disebutkan secara implisit dalam APBN namun sektor infrastruktur pada penelitian ini terdiri dari sektor penyedia perumahan (R) dan transportasi (T). Kedua sektor tersebut memiliki bagian tersendiri dalam anggaran pembangunan APBN yang tidak disatukan, namun dilihat dari sifat

anggarannya merupakan bagian dari infrastruktur. Variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi dihitung dalam satuan milyar Rupiah dan dengan periode pengamatan 1969-2009.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan mempunyai sifat berkala (*time series*). Data yang dipilih adalah data pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastuktur serta pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 2009. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Departemen Keuangan RI dan Bank Dunia. Periode tahun anggaran APBN sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000 berbeda. Sebelum tahun 2000 penyusunan anggaran berdasarkan tahun fiskal (1 April sampai dengan 31 Maret ) dan setelah tahun 2000 sampai sekarang menggunakan tahun kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember ) yang menyebabkan terdapat selisih antara tahun 1999/2000 dengan tahun 2000. Untuk menyeragamkan periode dilakukan interpolasi linier yang dikembangkan oleh Insukindro (insukindro,1992) yaitu:

$$Q_{t1} = \frac{1}{4} \left\{ Q_t - \frac{4,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \dots \dots \dots (3.1)$$

$$Q_{t2} = \frac{1}{4} \left\{ Q_t - \frac{1,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \dots \dots \dots (3.2)$$

$$Q_{t3} = \frac{1}{4} \left\{ Q_t + \frac{1,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \dots \dots \dots (3.3)$$

$$Q_{t4} = \frac{1}{4} \left\{ Q_t + \frac{4,5}{12} (Q_t - Q_{t-1}) \right\} \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

$Q_t$  = Kuartal periode/ tahun t

$Q_{t-1}$  = Kuartal periode / tahun t-1

$Q_{t1}$  = Kuartal pertama tahun t

$Q_{t2}$  = Kuartal kedua tahun t

$Q_{t3}$  = Kuartal ketiga tahun t

$Q_{t4}$  = Kuartal keempat tahun t

**Tabel 3.1**  
**Sumber Data**

Variabel	Sumber Data
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	Situs Resmi World Bank periode tahun 1969-2009
<b>Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan</b>	Departemen Keuangan RI APBN anggaran belanja pembangunan bidang sosial subsektor pendidikan periode 1969-2004, anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi pendidikan 2005-2009
<b>Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan</b>	Departemen Keuangan RI APBN anggaran belanja pembangunan bidang sosial subsektor kesehatan periode 1969-2004, anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan 2005-2009
<b>Pengeluaran Pemerintah atas Perumahan</b>	Departemen Keuangan RI APBN anggaran belanja pembangunan subsektor perumahan periode 1969-2004, anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi ekonomi sektor transportasi periode 2004-2009
<b>Pengeluaran Pemerintah atas Transportasi</b>	Departemen Keuangan RI APBN anggaran belanja pembangunan subsektor transportasi periode 1969-2004, anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi ekonomi sektor transportasi periode 2004-2009

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan tehnik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain – lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Departemen Keuangan RI, Badan Pusat Statistik dan situs resmi *World Bank*. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing – masing variabel.

### 3.4 Metode Analisis

Dalam ilmu ekonomi ketergantungan suatu variabel (variabel terikat) terhadap variabel lain (variabel bebas) tidak hanya bersifat seketika. Seperti sering suatu variabel bereaksi terhadap variabel lain dengan suatu selang waktu atau “lag”. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan tidak dapat langsung mempengaruhi tingkat

partisipasi murid atau kualitas lulusan sekolah begitu juga variabel pengeluaran pemerintah yang lain. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu investasi tidak dapat seketika mempengaruhi output. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah yang berupa konsumsi dan pengeluaran yang bersifat investasi cenderung sama, yaitu akan habis dibelanjakan sehingga tidak berpengaruh terhadap output. Namun demikian dalam jangka panjang investasi pemerintah memiliki efek terhadap peningkatan output. Hal ini dikarenakan adanya kelambanan atau “lag” didalamnya.

Menurut Gujarati (2003) alasan terjadinya kelambanan atau *lag* dalam suatu analisis adalah sebagai berikut:

#### 1. Alasan Psikologis

Unsur kebiasaan menyebabkan seseorang tidak megubah pola konsumsinya dengan seketika karena adanya perubahan harga atau peningkatan pendapatan. Hal ini sebabkan karena proses perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan (*immediatel disutility*). Reaksi terhadap peningkatan pendapatan tergantung pada peningkatan pendapatan tersebut tetap ataukah sementara

#### 2. Alasan Teknologis

Penurunan harga modal relatif terhadap tenaga kerja yang bersifat sementara tidak akan menyebabkan perusahaan mensubtitusi modal terhadap tenaga kerja.

#### 3. Alasan Kelembagaan

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Kewajiban kontrak dapat mencegah perusahaan-perusahaan melakukan perubahan dari suatu sumber tenaga kerja atau bahan mentah ke sumber lain. Misalkan seseorang menanamkan dananya pada rekening tabungan dengan jangka waktu 1 tahun, 3 tahun atau 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut sebenarnya berada dalam kondisi *locked in* (terperangkap karena paling tidak selama satu tahun, orang tersebut tidak dapat mengalihkan dananya ke dalam bentuk lain).

Dinamika perkembangan variabel-variabel ekonomi juga dapat diamati dari perspektif antar waktu dimana fluktuasi dan dinamika variabel-variabel tersebut naik turun secara siklikal, seasonal, karena pengaruh tren waktu, maupun karena adanya goncangan (*shock*). Model-model struktural yang digunakan untuk menjelaskan dinamika variabel-variabel ekonomi tersebut dalam hubungannya dengan runtun waktu dengan model-model dinamis (*dynamic model*). Namun sering kali teori ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan spesifikasi hubungan antar variabel yang dikonstruksikan dalam persamaan simultan dinamis. Terlebih lagi estimasi dan statistik inferensi menjadi sulit untuk dilakukan ketika spesifikasi model ekonometri melibatkan variabel-variabel endogen baik di sisi kiri persamaan maupun sisi kanan persamaan. Kesulitan ini menyebabkan munculnya alternatif untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel di dalam model non struktural.

Adanya masalah tersebut mendorong alternatif lain yang sering disebut model non struktural. Pendekatan ini mencari hubungan antara bermacam-macam variabel

yang diinginkan. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model Error Correction Model (ECM). Dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara matematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = f(P_t, K_t, R_t, T_t) \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana :

$P_t$  : pengeluaran pemerintah atas pendidikan/tahun

$K_t$  : pengeluaran pemerintah atas kesehatan/tahun

$R_t$  : pengeluaran pemerintah atas perumahan /tahun

$T_t$  : pengeluaran pemerintah atas transportasi /tahun

$Y$  : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Sehingga persamaannya

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 K + \alpha_3 R + \alpha_4 T + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.6)$$

Model ini dibentuk dengan maksud untuk melihat pengaruh secara bersamaan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan, pengeluaran pemerintah atas kesehatan, pengeluaran pemerintah atas perumahan, pengeluaran pemerintah atas transportasi, dan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Model estimasi yang digunakan dalam analisis ini terdiri atas : model *error correction model* (ECM) dan *Ordinary Least Square* (OLS). Melalui model ECM diharapkan dapat dijelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang

keterkaitan antar variabel-variabel yang diamati. ECM memberikan pendekatan yang berhubungan dengan masalah variabel runtun waktu yang tidak stasioner dan korelasi lancung (Thomas RL,1997 dalam Sri Isnowati,2002). Model koreksi kesalahan mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi.

### 3.4.1 Error Correction Model

*Error correction model* dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan dalam konteks bahwa fenomena yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang senyatanya dan perlunya yang bersangkutan melakukan penyesuaian sebagai akibat adanya perbedaan fenomena aktual yang dihadapi antar waktu. Selanjutnya dengan menggunakan ECM dapat dianalisis secara teoritik dan empirik apakah model yang dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak (Sri Inowati,2002). Alasan digunakan ECM dalam penelitian ini (Insukindro,1993):

1. ECM yang merupakan suatu autoregresif, mengikutsetakan pertimbangan pengaruh lag dalam analisisnya sehingga model ini sesuai diterapkan dalam penelitian yang menggunakan data yang berbentuk time series
2. Kemampuan ECM meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang
3. Pendekatan ini telah diterapkan di Indonesia dan mampu menjelaskan pengalaman-pengalaman ekonomi di Indonesia

Variasi variabel tak bebas pada periode tertentu yang diteliti tidak ditentukan oleh variasi variabel bebas pada periode yang sama tetapi juga variasinya di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dengan begitu model yang selaras dengan kenyataan tersebut adalah model linier dinamis.

Penurunan model dinamis dengan menggunakan fungsi biaya kuadrat (*quadratic cost function*) sudah secara luas digunakan dalam khasanah penelitian ekonomi. Namun pendekatan ini bukanlah satu-satunya, masih ada alternatif lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan *Auto Distributed Lags* (ADL). Dalam pendekatan ADL ini akan dijumpai pendekatan Koyck dan Almond. Pendekatan ADL ini dilakukan dengan cara memasukkan variabel kelambanan (*lag variabel*) dalam model. Pendekatan fungsi biaya kuadrat ini mengasumsikan bahwa model tidak terdapat keseimbangan, pendekatan ECM – Engle Granger ini lebih cocok dengan ilmu ekonomi.

Anggaphlah bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (*desired exchange rate = Y\**) dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas Pendidikan (P), kesehatan (K), perumahan (R) dan transportasi (T), dinyatakan dalam hubungan jangka panjang atau keseimbangan (*Long-run or equilibrium relationship*) sebagai berikut :

$$Y_t^* = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 K + \alpha_3 R + \alpha_4 T \quad (3.7)$$

Jika  $Y_t^*$  berada pada titik keseimbangan terhadap  $P_t$ ,  $K_t$ ,  $R_t$  dan  $T_t$  berarti persamaan 3.7 dipenuhi. Namun dalam sistem ekonomi pada umumnya jarang sekali terjadi keseimbangan seperti yang diinginkan, sehingga bila  $Y_t$  mempunyai nilai yang

berbeda dengan nilai keseimbangan maka terjadilah perbedaan nilai antara sisi kanan dan sisi kiri persamaan 3.8 sebesar :

$$De = Y_t^* - \alpha_0 - \alpha_1 P - \alpha_2 K - \alpha_3 R - \alpha_4 T \quad (3.8)$$

Nilai perbedaan (De) ini dikenal sebagai kesalahan ketidakseimbangan atau *disequilibrium error*. Kemudian dilakukan perumusan fungsi biaya kuadrat tunggal sebagai berikut :

$$C_t = b_1(Y_t - Y_t^*) + b_2\{(Y_t - Y_{t-1}) - f_t(Z_t - Z_{t-1})\}^2 \quad (3.9)$$

$Y_t$  adalah pertumbuhan ekonomi periode  $t$ ,  $Z_t$  merupakan vektor variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dianggap dipengaruhi secara linier oleh pengeluaran pendidikan  $P_t$ , pengeluaran kesehatan  $K_t$ , pengeluaran perumahan  $R_t$ , dan pengeluaran transportasi  $T_t$ .  $b_1$  dan  $b_2$  merupakan vektor baris yang memberikan bobot kepada elemen  $Z_t - Z_{t-1}$ .

Kemudian dengan meminimalisasikan persamaan 3.7 terhadap  $Y_t$  dan mensubstitusikan  $Z_t$  sebagai fungsi dari  $P_t$ ,  $K_t$ ,  $R_t$  dan  $T_t$  akan diperoleh :

$$Y_t = g_0 + g_1 P_t + g_2 K_t + g_3 R_t + g_4 T_t + g_5 P_{t-1} + g_6 K_{t-1} + g_7 R_{t-1} + g_8 T_{t-1} + g_9 Y_{t-1} \quad (3.10)$$

Dimana :  $g_0 = \alpha_0 b$ ,  $g_1 = \alpha_1 b + (1-b)f_1$ ,  $g_2 = \alpha_2 b + (1-b)f_2$ ,  $g_3 = \alpha_3 b + (1-b)f_3$ ,  $g_4 = \alpha_4 b + (1-b)f_4$ ,  $g_5 = -(1-b)f_1$ ,  $g_6 = -(1-b)f_2$ ,  $g_7 = -(1-b)f_3$ ,  $g_8 = -(1-b)f_4$ ,  $g_9 = (1-b)$ ,  
 $b = b_1 / (b_1 + b_2)$

$f_1$  merupakan vektor baris yang menunjukkan pengaruh  $P_t$  terhadap  $Z_t$ ,  $f_2$  adalah vektor baris yang menunjukkan pengaruh  $K_t$  terhadap  $Z_t$ ,  $f_3$  adalah vektor baris yang menunjukkan pengaruh  $R_t$  terhadap  $Z_t$ ,  $f_4$  adalah vektor baris yang menunjukkan pengaruh  $T_t$  terhadap  $Z_t$ . Persamaan 3.10 mencerminkan hubungan jangka pendek (*short-run*) atau ketidakseimbangan yang meliputi nilai arah dan kelambanan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran perumahan dan pengeluaran transportasi.

Permasalahan utama dalam mengestimasi persamaan 3.10 berkaitan dengan arah variabel (*level of variabel*) yang mungkin tidak stasioner. Jika arah variabel tidak stasioner maka estimasi persamaan 3.10 dengan menggunakan OLS (*ordinary least square*) atau regresi klasik dapat menyebabkan munculnya regresi lancung atau *spurious regression*. Untuk mengatasi permasalahan itu, persamaan 3.10 diparameterisasi ulang (*reparameterize*) menjadi :

$$\Delta Y_t = \alpha_1 \Delta P_t + \alpha_2 \Delta K_t + \alpha_3 \Delta R_t + \alpha_4 \Delta T_t + \alpha_5 (Y - \beta_0 - \beta_1 P - \beta_2 K - \beta_3 R - \beta_4 T)_{t-1}$$

(3.11)

Dimana:  $\alpha_1 = g_1$ ,  $\alpha_2 = g_2$ ,  $\alpha_3 = g_3$ ,  $\alpha_4 = g_4$ ,  $\beta_0 = g_0 / 1 - g_7$ ,  $\beta_1 = g_1 + g_2 / 1 - g_7$ ,  $\beta_2 = g_2 + g_3 / 1 - g_7$ ,  $\beta_3 = g_3 + g_4 / 1 - g_7$  dan  $\Delta X_t = \Delta X_t - \Delta X_{t-1}$

Persamaan 3.11 menjelaskan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi ( $\Delta Y_t$ ) dipengaruhi oleh perubahan pengeluaran pendidikan ( $\Delta P_t$ ), perubahan pengeluaran kesehatan ( $\Delta K_t$ ), perubahan pengeluaran perumahan ( $\Delta R_t$ ), perubahan pengeluaran

transportasi ( $\Delta T_t$ ) dan kesalahan ketidakseimbangan atau komponen koreksi kesalahan (*error correction component* atau *error correction term*) periode sebelumnya. Jika diamati lebih lanjut akan terlihat bahwa persamaan 3.11 hanya meliputi kelambanan satu periode sehingga ECM ini dikenal sebagai *first order* ECM. Selanjutnya seperti telah disinggung dimuka, hal penting yang perlu dikemukakan disini adalah arti parameter dari parameter persamaan 3.12. Parameter  $\alpha$  ( $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  dan  $\alpha_4$ ) menjelaskan pengaruh jangka pendek variabel ( $\Delta P_t$ ), ( $\Delta K_t$ ), ( $\Delta R_t$ ), ( $\Delta T_t$ ), terhadap  $\Delta Y_t$ , sedangkan parameter  $\beta$  ( $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  dan  $\beta_4$ ) menjelaskan pengaruh jangka panjang variabel  $\Delta P_t, \Delta K_t, \Delta R_t$  dan  $\Delta T_t$  terhadap  $\Delta Y_t$ . Persamaan 3.12 seringkali diparameterisasi lebih lanjut, menjadi:

$$\Delta Y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta P_t + \gamma_2 \Delta K_t + \gamma_3 \Delta R_t + \gamma_4 \Delta T_t + \gamma_5 \Delta P_{t-1} + \gamma_6 \Delta K_{t-1} + \gamma_7 \Delta R_{t-1} + \gamma_8 \Delta T_{t-1} + \gamma_9 (P_{t-1} + K_{t-1} + R_{t-1} + T_{t-1} - Y_{t-1})$$

(3.12)

Dimana :  $\gamma_0 = -\alpha_4 \beta_0, \gamma_1 = \alpha_1, \gamma_2 = \alpha_2, \gamma_3 = \alpha_3, \gamma_4 = \alpha_4, \gamma_5 = -\alpha_4(1 - \beta_1),$   
 $\gamma_6 = -\alpha_4(1 - \beta_2), \gamma_7 = -\alpha_4(1 - \beta_3), \gamma_8 = -\alpha_4$

ECM mempunyai ciri khas dengan dimasukkannya unsur *Error Correction Term* (ECT) atau  $\gamma_9 (P_{t-1} + K_{t-1} + R_{t-1} + T_{t-1} - Y_{t-1})$  dalam model. Apabila koefisien ECT signifikan secara statistik dan mempunyai tanda positif, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sah atau valid. Dalam persamaan 3.13 nilai koefisien ECT antara nol sampai dengan satu ( $0 < \beta_3 <$

1). Koefisien jangka pendek dari persamaan model ECM direpresentasikan oleh koefisien  $\beta_1$ , sedangkan untuk memperoleh besaran koefisien regresi jangka panjang dengan menggunakan model *ECM*, maka digunakan rumus sebagai berikut:  
 Konstanta =  $\beta_0 / \beta_3$ ,  $X_t = (\beta_2 + \beta_3) / \beta_3$

#### - *Error Condition Term (ECT)*

Jika variabel dependen dan variabel independen berkointegrasi maka terdapat hubungan keseimbangan panjang antar variabel tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menjamin adanya keseimbangan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Error correction term (ECT) dalam uji kointegrasi bisa digunakan sebagai equilibrium error untuk menentukan perilaku variabel dependen dalam jangka pendek (Gujarati,2003). Untuk hasil regresi dari persamaan ini yaitu dengan menggunakan rumus

$$DLY_t = \alpha_0 + ECT_{t-1} + \alpha_1 DP_t + \alpha_2 DK_t + \alpha_3 DR_t + \alpha_4 DT_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.13)$$

untuk persamaan jangka pendek sedangkan untuk hubungan jangka panjang (*disequilibrium longrun relationship*) dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$LY_t = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 K_t + \alpha_3 R_t + \alpha_4 T_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.14)$$

#### - **Penentuan Panjang Lag**

Untuk melakukan uji kointegrasi terlebih dahulu dilakukan uji panjang lag. Penentuan panjang lag atau lag yang optimum dalam studi ini mengikuti konsep yang dilakukan oleh Schwarz, yaitu dengan memperhatikan besaran

*Schward Criterion* yang dihasilkan. Adapun besaran *Schward Criterion*(SC) dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$SC = e^{2k/n} \frac{\sum U_i^2}{n} = e^{2k/n} \frac{RSS}{n} \quad (3.15)$$

Dimana:

RSS = Residual Sum Square

K = Jumlah parameter termasuk intersep

N = Jumlah observasi

Untuk kemudahan perhitungan, persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln SC = (2k/n) + \ln (RSS/n) \quad (3.16)$$

Dimana :

Ln SC = Logaritma natural dari SC

$2k/n$  = *penalty factor*

Adapun prosedur yang perlu dilakukan adalah menentukan lag optimal untuk X dengan melakukan autoregresi berturut-turut pada lag 1,2,3,... n sehingga harus menentukan lag maksimal, misal lag maksimal (n) adalah 5. Dari hasil-hasil regresi tersebut diperhatikan SC yang dihasilkan, kemudian dipilih SC yang terkecil sebagai panjang lag yang optimal. Setelah panjang diketahui kemudian dimasukkan variabel Y untuk mengetahui apakah Y berpengaruh terhadap X berturut-turut mulai lag 1,2,...n. dari hasil regresi-regresi tersebut dipilih model dengan besaran *Schwardi* paling kecil.

## - Pengujian Stasioneritas

Stasioneritas merupakan syarat penting untuk memulai langkah estimasi model persamaan regresi. Secara umum dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang variabelnya tidak stasioner akan menghasilkan regresi lancung. Jika seri data tidak stasioner, maka rata-rata dan *variance* sampelnya akan berubah bersama berjalannya waktu. Oleh karena itu dilakukan pengujian terhadap data runtun waktu tersebut apakah stasioner atau tidak sebagai salah satu prosedur yang dilakukan. Menurut thomas (1997, hal.374) dalam (Mudrajat Kuncoro,2004), data stasioner adalah data yang runtun waktu yang tidak mengandung akar – akar unit (*unit roots*). Sebaliknya adalah data yang tidak stasioner yaitu data runtun waktu yang mengandung akar-akar unit. Data runtun waktu dikatakan stasioner jika mean, variance dan covariance data tersebut konstan sepanjang waktu.

### 1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Teori ekonometri berlandaskan asumsi stasioneritas data yang ditunjukkan dengan nilai mean, varian dan kovarian yang konstan untuk semua nilai  $t$ . Bila regresi dilakukan pada data runtun yang tidak stasioner maka dikhawatirkan akan menghasilkan regresi lancung (*spurious regression*). Regresi linier lancung ditandai dengan nilai  $R^2$  tinggi dan nilai DW yang rendah (Insurkindro, 1998). Akibat yang ditimbulkan dari regresi linier lancung adalah koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan

regresi tersebut akan meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien terkait menjadi tidak shahih.

Menurut Gujarati (2003), pengujian stasioneritas data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Melakukan *ploting* terhadap data
2. Melihat *correlogram autocorrelation fuction*
3. Uji akar-akar unit

Penelitian ini menggunakan uji akar-akar unit untuk melihat stasioneritas data. Uji derajat integrasinya akan dilakukan jika data belum stasioner pada derajat nol. Uji stasioneritas ini t apakah data *time series* mengandung akar unit (*unit root*). Untuk itu, metode yang digunakan adalah uji Philips-Peron Test. Pengujian unit root menggunakan Phillips-Peron Test ataupun Augmented Dickey-Fuller yang paling sering digunakan. Uji PP (Phillips and Peron dalam Eviews 6, 2000) diformulasikan sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta_{yt-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.17)$$

Sementara uji ADF memperbaiki orde yang lebih tinggi pada serial correlation dengan menambahkan perbedaan waktu pada sisi sebelah kanan, uji PP menggunakan perbaikan t-statistik pada  $\gamma$  koefisien dari regresi diatas untuk menghitung serial correlation  $\varepsilon$  setiap bernilai nol bahwa heteroskedasitas dan autokorelasi yang kuat memiliki bentuk yang tidak diketahui.

Jika moving average term penting, angka dari extra lags  $\Delta Y_t$  membutuhkan sebuah regressor pada pengkoreksian autoregressive yang mungkin sangat besar. Schwert (1989) menggunakan simulasi monte carlo, angka extra pada uji tersebut mungkin jauh dari angka normal jika orde pada koreksi autoregressive tidak mengikat pada peningkatan ukuran sample. Sebuah penyesuaian sangat esensial karena dampak dari struktur korelasi residual dalam bentuk distribusi menjadi lebih tepat. Intinya adalah fakta bahwa dengan pentingnya komponen moving average di struktur dari rangkaian dengan sebuah angka yang besar pada parameter nuisance yang sangat dibutuhkan pada estimasi. Sejak dimulai sebuah observasi yang lebih efektif pada beberapa extra lag  $\Delta Y_t$ , ini mengimplikasikan bahwa pendekatan Said dan Dickey mungkin lebih lemah ketika moving average lebih penting. Hal ini mengindikasikan bahwa DF test kurang kuat dibandingkan PP test.

Pada sisi lain, beberapa simulasi pembelajaran menunjukkan bahwa Uji nonparametric Phillips dan Peron memiliki distorsi yang lebih serius pada jumlah sampel ketika data secara umum memiliki keunggulan negatif autokorelasi di *first difference* (Schwert,1989; Phillips and Peron 1988; Dejong, 1992 dalam Mandala dan Kim, 2004). Hal ini dapat dijadikan pendapat, bahwa uji nonparametric Phillips-Peron kurang meyakinkan untuk digunakan dibandingkan ADF. Bagaimanapun, Peron dan Ng (1996)

menyarankan penggunaan PP test yang lebih mudah digunakan dengan modifikasinya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Hipotesis yang digunakan adalah  $H_0 : \phi^* = 0$  (data tidak stasioner) dan  $H_a : \phi^* \neq 0$  (data stasioner). Jika probabilitas t statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan (5 persen) atau nilai PP dihitung lebih negatif dari critical value-nya maka hipotesis nol ditolak yang berarti data yang diuji stasioner.

## 2. Uji Derajat Integrasi

Uji ini merupakan kelanjutan dari uji akar unit, apabila setelah dilakukan pengujian akar unit ternyata data belum stasioner, maka dilakukan pengujian ulang dan menggunakan data nilai perbedaan pertamanya (*first difference*). Apabila dengan data dari *first difference* belum juga stasioner maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan data dari perbedaan kedua (*second difference*) dan seterusnya hingga diperoleh data yang stasioner. (Gujarati,1999)

### - Uji Kointegrasi

Setelah melakukan uji stasioneritas maka karakteristik data dapat kita ketahui apakah data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah data yang stasioner atau tidak. Kointegrasi dapat diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang (*long term relation / equilibrium*) antara variabel- variabel yang tidak stasioner. Keberadaan hubungan kointegrasi memberikan peluang bagi data-data yang secara individual tidak stasioner untuk menghasilkan sebuah kombinasi linier diantara data tersebut sehingga tercipta kondisi yang

stasioner. Kointegrasi regresi bermaksud membuktikan bahwa terjadi kesesuaian dengan teori jangka panjang.

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar unit dan uji derajat integrasi. Tujuan dilakukannya uji kointegrasi adalah untuk menguji stasionaritas residual regresi kointegrasi. Stasioneritas residual sangat penting jika ingin mengembangkan suatu model dinamis, terutama ECM yang mencakup variabel-variabel kunci pada regresi kointegrasi terkait. Pada prinsipnya dalam model koreksi kesalahan (ECM) terdapat keseimbangan jangka panjang yang tetap diantara variabel-variabel ekonomi. Jika dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode, maka model koreksi kesalahan akan mengoreksi sendiri kesalahan pada periode berikutnya. Mekanisme koreksi kesalahan ini dapat diartikan sebagai penyelarasan perilaku jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian model koreksi kesalahan konsisten dengan konsep kointegrasi.

Thomas (1997) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang yang unik antara dua variabel runtun waktu dapat terjadi jika:

1. kedua variabel runtun waktu tersebut stasioner setelah dideferensiasi satu kali
  2. terdapat kombinasi linier antara kedua variabel stasioner tersebut. Jika hal ini terjadi, maka korelasi antara kedua variabel tersebut tidak *spurious*
- Eangle dan Granger (1987) mengetengahkan uji statistik untuk menguji hipotesis nol tidak adanya kointegrasi. Namun mereka berpendapat

bahwa dalam sebagian kasus yang diamati ternyata uji CDRW (*Cointegrating Regression Durbin Watson*), DF (*Dickey-Fuller*) dan ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) merupakan uji statistik yang paling disukai dan sering digunakan dalam pendekatan ini.

Mengestimasi nilai residu dari hasil regresi pada persamaan di atas untuk mendapatkan nilai Phillips-Peron Test (PP) uji kointegrasi, yang ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung koefisien  $U_{t-1}$  pada persamaan:

$$\Delta U_t = \alpha_1 U_{t-1} + \sum_{i=1}^p \alpha_{t+1} U_{t-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.18)$$

Hasil estimasi nilai PP statistik diatas, kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya untuk ketiga uji tersebut dalam nilai PP untuk uji kointegrasi. Jika PP statistik / hitung pada derajat kepercayaan tertentu lebih besar dari nilai kritisnya berarti  $H_0$  yang menyatakan tidak ada kointegrasi antara variabel dapat ditolak. Dengan kata lain variabel-variabel yang ada dalam persamaan tersebut saling berkointegrasi.

### 3.4.2 Pengujian Model Asumsi Klasik

Secara umum dalam pendekatan ekonometrik perlu dilakukan apa yang disebut sebagai uji asumsi klasik. Tujuannya agar diperoleh penaksiran yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE), maka terhadap estimasi model penelitian tersebut perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari :

#### - Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB) dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai  $X^2$  (Chi Square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal.

$$\text{J-B hitung} = \left[ \frac{S^2}{6} + \left( \frac{K-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots(3.19)$$

Dimana :

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai J-B hitung > J-B tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $U_t$  terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

### - Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah ada tidaknya suatu hubungan linear yang sempurna atau yang mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas dalam persamaan.

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan sangat tinggi , namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Melakukan regresi parsial dengan cara :
  - a. Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai  $R^2$
  - b. Menggunakan *auxiliary regression* pada masing-masing variabel independen
  - c. Membandingkan nilai  $R^2$  dalam model persamaan awal dengan  $R^2$  pada model regresi parsial. Jika nilai  $R^2$  dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinearitas.

Penelitian ini menggunakan Klein's rules of thumbs, yaitu dengan meregresi setiap variabel penjelas terhadap sisa variabel penjelas untuk memperoleh koefisien determinasi  $r^2$  (koefisien determinasi regresi parsial). Nilai  $r^2$  ini kemudian dibandingkan dengan koefisien determinasi  $R^2$  pada model regresi awal. Apabila  $r^2$  melebihi  $R^2$ , maka terdapat hubungan yang kolinear di antara variabel penjelasnya. Selama sifat multikolinearitas yang muncul bukan multikolinearitas sempurna, maka model tetap dapat diestimasi.

#### - Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedasita juga bertentangan dengan salah satu

asumsi dasar regresi homoskedasitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedasitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (*asimtotik*). Penelitian ini menggunakan uji White untuk menguji ada tidaknya heteroskedasitas.

Dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas antara lain dengan menggunakan uji *white*. Uji *white* dapat menjelaskan apabila nilai probabilitas  $obs \cdot R\text{-square}$  lebih kecil dari  $\alpha$  (5%) maka data bersifat heteroskedasitas begitu pula sebaliknya.

### - Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residu (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada jenis data time series. salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch-Godfrey (BG Test) (Gujarati, 2003). Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan variabel pengganggu  $\mu_i$  dengan menggunakan model autoregressive dengan orde  $\rho$  sebagai berikut:

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_\rho U_{t-\rho} + \epsilon_t \dots \dots \dots (3.20)$$

Dengan  $H_0$  adalah  $\rho_1 = \rho_2 \dots \dots \rho_p = 0$ , dimana koefisien autoregressive secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila  $X^2$  tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai Obs\*R-squared, maka model tersebut bebas dari autokorelasi.

### 3.4.3 Metode Pengujian Hipotesis

#### - Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_a: \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_k \neq 0$$

Hipotesis 1

$H_0: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$  semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Hipotesis 2

$H_a: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$  semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ .

- **Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)**

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji 1 dengan tingkat kepercayaan 5% dengan hipotesis:

Hipotesis 1

$H_0 : \alpha_1 \leq 0$  Pengeluaran pemerintah atas pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

$H_a : \alpha_1 > 0$  Pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Hipotesis 2

$H_0 : \alpha_2 \leq 0$  Pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

$H_a : \alpha_2 > 0$  Pengeluaran pemerintah atas kesehatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Hipotesis 3

$H_0 : \alpha_3 \leq 0$  Pengeluaran pemerintah atas perumahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

$H_a : \alpha_3 > 0$  Pengeluaran pemerintah atas perumahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Hipotesis 4

$H_o : \alpha_4 \leq 0$  Pengeluaran pemerintah atas transportasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

$H_a : \alpha_4 > 0$  Pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dengan ketentuan  $H_o$  ditolak bila probabilitas lebih kecil dibandingkan tingkat kepercayaan 5% dan  $H_o$  diterima bila probabilitas lebih besar dibanding tingkat kepercayaan 5%.

#### 3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Gujarati (1995), koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen, dimana nilai  $R^2$  mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1.

Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted  $R^2$

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Makroekonomi

Kondisi Makro ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, di Indonesia seperti kebanyakan negara sedang berkembang lainnya perekonomiannya masih sangat rentan dengan gejolak ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah Inflasi, tingkat pengangguran, harga minyak dunia dan kebijakan fiskal. Sebagai salah satu instrumen ekonomi, kebijakan fiskal harus mendorong pertumbuhan ekonomi secara sehat, mampu mengendalikan inflasi, mengurangi angka pengangguran neraca pembayaran, sebagai tujuan utamanya. Mengingat kondisi tahun ini dan tahun-tahun mendatang, fungsi fiskal menjadi salah satu instrumen makro yang sangat penting. Jadi, kalau kebijakan fiskal gagal berarti sangat mungkin kita tidak akan mampu mencapai perbaikan makro ekonomi.

Kebijakan fiskal harus benar-benar diarahkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan meredam inflasi minimal dibawah satu digit. Kebijakan fiskal juga harus mampu menyiptakan akumulasi *reserve* dalam bentuk pendapatan devisa.

Dilain pihak karakter kebijakan fiskal sangat tidak fleksibel karena setiap kebijakan harus diputuskan melalui konsultasi DPR bersama-sama pemerintah dalam proses yang cukup lama. Tidak jarang, ketika anggaran fiskal mendapat persetujuan DPR, menteri atau departemen terkait sudah memberikan disposisi dan ketika dikembalikan ke departemen teknis, persoalannya sudah berubah lagi. Karakter fiskal yang lambat ini sebagai suatu instrumen yang sangat penting ditengah kondisi krisis ini. kebijakan fiskal melalui APBN yang konservatif seringkali tidak mampu mengakomodasikan persoalan yang besar. Karena itulah, kebijakan fiskal kita ditantang untuk lebih terbuka. Kebijakan fiskal kita dituntut mampu mengantisipasi perubahan yang besar dalam struktur APBN dalam upaya me-recovery ekonomi.

Pada struktur APBN untuk tahun anggaran 1969-2004 pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada tahun anggaran 2005 dan 2006 pengeluaran pemerintah adalah total dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal , pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja dan lain-lain. Selama pembangunan ekonomi dari tahun 1969-2006 pengeluaran pemerintah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Semakin banyaknya aktivitas pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Pada pelita 1 dan pelita 2 terjadi kenaikan harga minyak, dimana negara Arab anggota OPEC melakukan embargo penjualan minyak. Harga

minyak dipasaran dunia melambung tinggi. Indonesia sebagai salah satu pengekspor minyak turut menikmati dampak positifnya. Penerimaan devisa dari ekspor melonjak, sehingga membuat pemerintah mampu menaikkan pengeluarannya.

Saat krisis menimpa, pada tahun 1997/1998 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan membengkaknya subsidi BBM dan pengeluaran operasional yang berkaitan dengan valuta asing. Sebagai dampak dari krisis pada tahun anggaran 1998/1999 orientasi kebijakan fiskal difokuskan pada penggerak roda perekonomian, serta mengurangi tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya. Mulai dari pelita V pengeluaran pemerintah meningkat dari pelita sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak pelita I sampai dengan pelita VI, anggaran pemerintah yang kita tempuh adalah anggaran yang defisit.

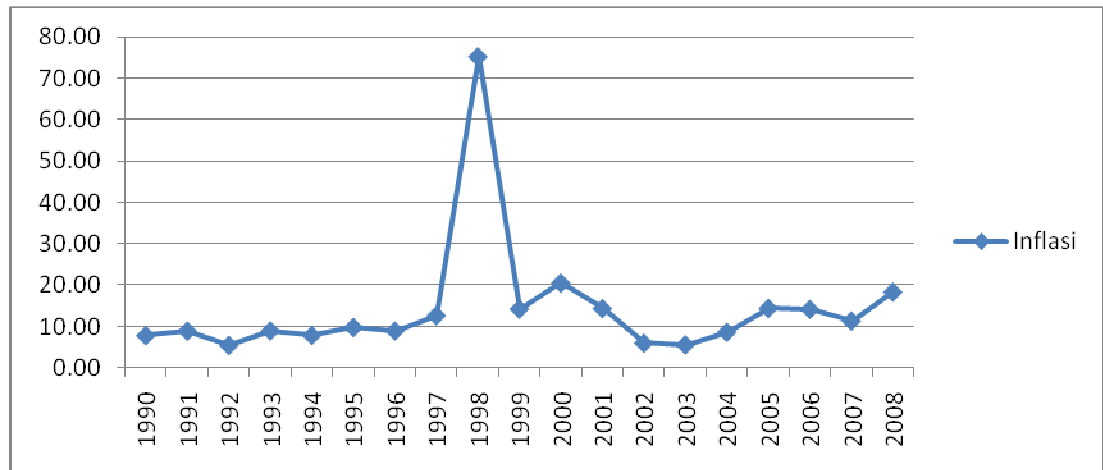
Mulai tahun 2005 pemerintah menerapkan format baru pada anggaran keuangannya. Langkah ini selain untuk menyesuaikan format anggaran negara dengan standar internasional, juga pada dasarnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara. Dalam hal transparansi, format baru ini diharapkan lebih jelas menunjukkan kewenangan dalam setiap anggaran sehingga sekaligus menunjukkan akuntabilitasnya.

Pada bulan Juli tahun 2007, krisis keuangan mulai melanda Amerika Serikat. Krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat telah

menimbulkan keterpurukan ekonomi yang sangat dalam bagi perekonomian Amerika Serikat. Krisis keuangan berawal ketika krisis *subprime mortgage* telah merontokkan sejumlah lembaga keuangan Amerika Serikat. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 6,28%. Perekonomian Indonesia tidak terpengaruh dengan berbagai gejolak eksternal yang terjadi. Gejolak *subprime mortgage* yang terjadi di AS hanya berpengaruh pada sektor keuangan di Indonesia (melalui pergerakan IHSG). Sementara itu, sektor riil tetap tumbuh dan tidak terpengaruh sama sekali dengan keadaan sektor keuangan.

Kenaikan harga minyak dunia tidak berdampak negatif secara signifikan bagi perekonomian pada tahun 2007. Namun kenaikan harga minyak mentah tersebut langsung telah mempengaruhi APBN 2007. Hal ini mengingat berbagai asumsi yang digunakan dalam menyusun APBN terkait dengan migas mengalami sejumlah perubahan.

**Grafik 4.1**  
**Perkembangan Inflasi Indonesia Periode 1990-2008**



Sumber : Statistik Indonesia BPS

Inflasi di Indonesia juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi namun inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Pada tabel diatas dapat diketahui mengenai laju inflasi yang terjadi di Indonesia pada periode 1990-2008. Pertumbuhan yang terjadi pada besarnya inflasi yang berlaku di Indonesia selalu mengalami fluktuasi. Tahun 1990-1996 bergerak pada kisaran 9 persen setiap tahunnya. Angka inflasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 hingga mencapai 75 persen, hal ini menyebabkan krisis ekonomi. Selanjutnya tingkat inflasi kembali mengalami fluktuasi.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004-2008**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2004	2005	2006	2007	2008
Tidak/belum pernah sekolah/sekolah/belum tamat SD	1.004.296	937.985	781.920	532.820	<b>547.038</b>
Sekolah Dasar	2.275.281	2.729.915	2.589.699	2.179.792	<b>2.099.968</b>
SLTP	2.690.912	3.151.231	2.730.045	2.264.198	<b>1.973.986</b>
SMTA	3.695.504	5.106.915	4.156.708	4.070.553	<b>3.812.522</b>
Diploma I/II/III Akademi	237.251	308.522	278.074	397.191	<b>362.683</b>
Universitas	348.107	395.538	395.554	566.588	<b>598.318</b>
<b>Jumlah</b>	<b>10.251.351</b>	<b>12.630.106</b>	<b>10.932.000</b>	<b>10.011.142</b>	<b>9.394.515</b>

Sumber: Statistik Indonesia, BPS

Kondisi makroekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari kondisi tenaga kerja terutama dari sisi pengangguran. Dari tabel 4.2 dapat terlihat bahwa jumlah pengangguran meskipun menunjukkan tren menurun tetapi jumlahnya masih cukup banyak. Tingkat pengangguran menunjukkan perekonomian belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Pemerintah berusaha untuk menekan angka pengangguran seperti yang terlihat pada tabel diatas angka pengangguran turun hingga mencapai angka 9.394.515 orang pada tahun 2008. Tingkat pendidikan dari para pengangguran didominasi oleh lulusan SMTA, SLTP dan Sekolah Dasar. Hal ini terlihat bahwa tenaga kerja yang tidak terserap adalah tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Kualitas pendidikan tenaga kerja akan

mempengaruhi produktifitas yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## 4.2 Deskripsi Variabel

### 4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pernah dialami pada tahun 1970-an dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 7,5% yaitu antara tahun 1973-1981. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu terjadi setiap tahun, pada tahun 1982 terjadi krisis minyak dan resesi ekonomi dunia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun hingga mencapai 2,3%. Antara tahun 1981-1986 rata-rata pertumbuhan ekonomi turun hingga mencapai 4,46%. Penyesuaian ekonomi dilakukan pemerintah dengan cara membangun sektor keuangan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari resesi ekonomi.

Setelah tahun 1988 pemerintah berhasil membuktikan kebijakan ekonominya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,46% dan terus berlanjut hingga tahun 1995 sebesar 8,22%. Kinerja perekonomian mengalami penurunan ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada bulan Juli tahun 1997. Kondisi perekonomian nasional pada tahun 1997 menghadapi permasalahan yang kurang menguntungkan berupa

krisis moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. dengan adanya krisis ekonomi tersebut, perekonomian semakin memburuk ditandai dengan Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan hingga turun sangat tajam mencapai -18,26% selain itu gejolak kurs dan meningkatnya angka kemiskinan, yang selanjutnya mengakibatkan semakin beratnya kehidupan masyarakat secara luas. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara terpadu lintassektoral, dalam jangka pendek akan menyulitkan upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi.

Dalam periode april 1998 sampai dengan oktober 1999 (masa setelah krisis), kebijakan fiskal memainkan peranan yang sangat besar dalam upaya-upaya penyehatan perbankan. Langkah utama yang dilaksanakan adalah penutupan bank-bank yang tidak sehat. Langkah ini bila dibaca dalam kondisi normal merupakan langkah yang tidak lazim dilakukan oleh otoritas fiskal. Selain itu, pemerintah membatalkan dan menunda berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras.

Sejak tahun 1999 perekonomian Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun, setelah masa krisis perekonomian Indonesia perlahan pulih hingga tahun 2006. Pada tahun 1999 ekonomi tumbuh sekitar 0,79%, tahun 2000 sekitar 4,92% tahun 2001 sekitar 3,64% dan 2002 sekitar 4,50%. Tahun 2003

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,78%, disusul 5,03% pada tahun 2004, 5,69% pada tahun 2005 dan 5,5% pada tahun 2006.

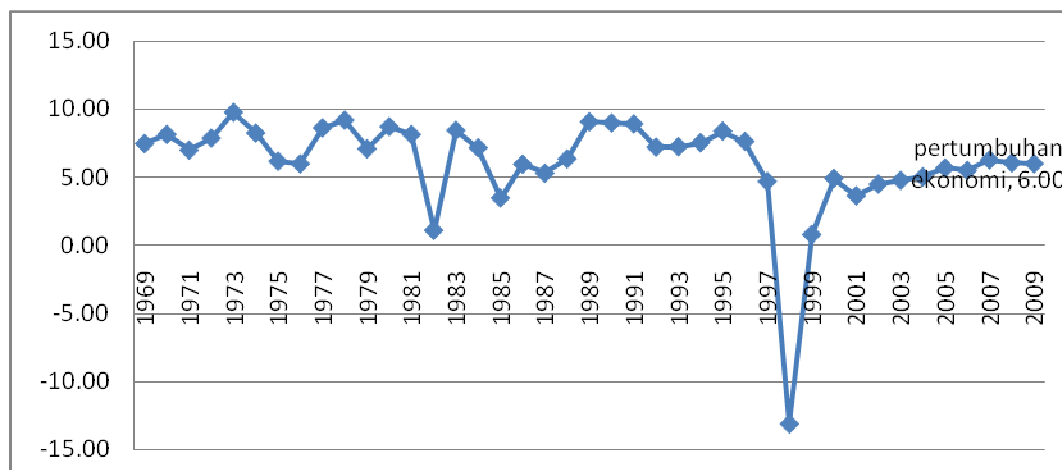
**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

**Grafik 4.2**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1969-2009**



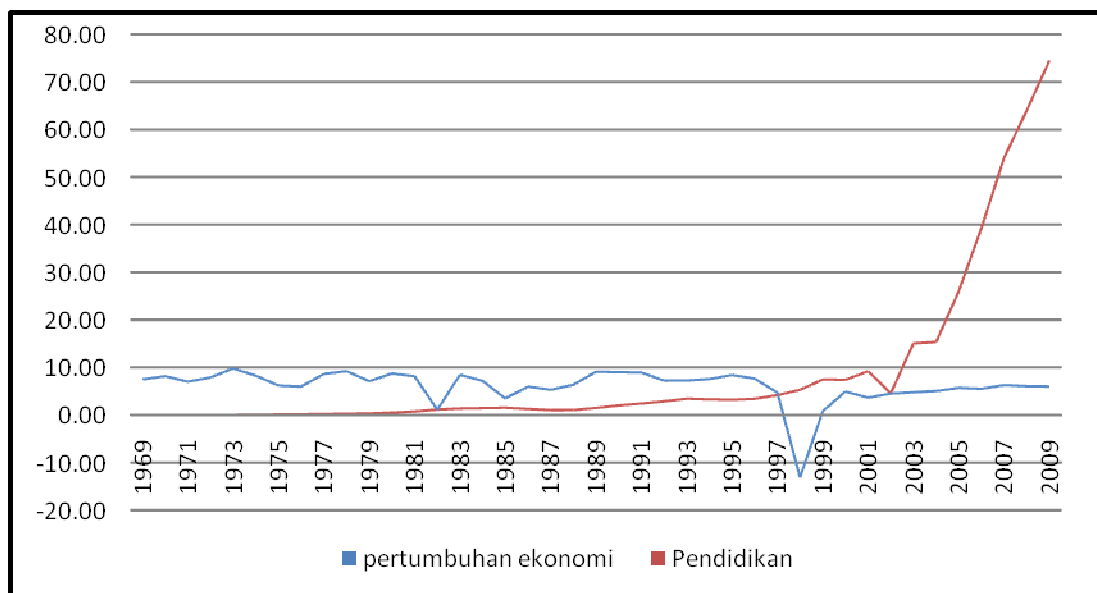
Sumber: Statistik Indonesia, BPS

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berfluktuatif. Dari tahun 1980an hingga tahun 1990an, pertumbuhan ekonomi sangat tidak stabil. Mulai tahun 1990an pertumbuhan ekonomi cenderung stabil, namun krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sangat tajam hingga ke level negatif. Pada sekitar tahun 2000an perekonomian Indonesia mulai mengalami masa pemulihan, hingga sekarang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 5,8% tingkat inflasi 5,3% dan PDB diperkirakan mencapai 6.253,8 triliun rupiah.

#### 4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental bagi sebuah negara. Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Perkembangan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dapat dilihat pada grafik 4.3 dibawah ini.

**Grafik 4.3**  
**Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 1969-2009**



Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Badan Kebijakan Fiskal-Departemen Keuangan

Jika dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 1969-1997 pengeluaran pemerintah atas pendidikan memiliki tren yang konstan. Kenaikan dan penurunan memang terjadi pada rentang waktu tersebut tetapi tidak terlalu banyak. Rata-rata perubahan pengeluaran pemerintah atas pendidikan hanya berkisar antara 0,1-0,7 persen. Pada periode krisis 1998/1999 pengeluaran pemerintah atas pendidikan hanya turun sekitar 3 persen, hal tersebut dikarenakan sektor pendidikan merupakan sektor yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga meskipun terjadi krisis pemerintah tetap harus menyediakan pelayanan pendidikan. Pada periode reformasi tahun 1999/2000 hingga setelah tahun 2003 pemerintah meningkatkan pengeluaran pembangunan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai anggaran pendidikan 10 persen dari APBN seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003. Sejak tahun 2003 pengeluaran pemerintah atas pendidikan terus meningkat hingga sekarang.

#### **4.2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan**

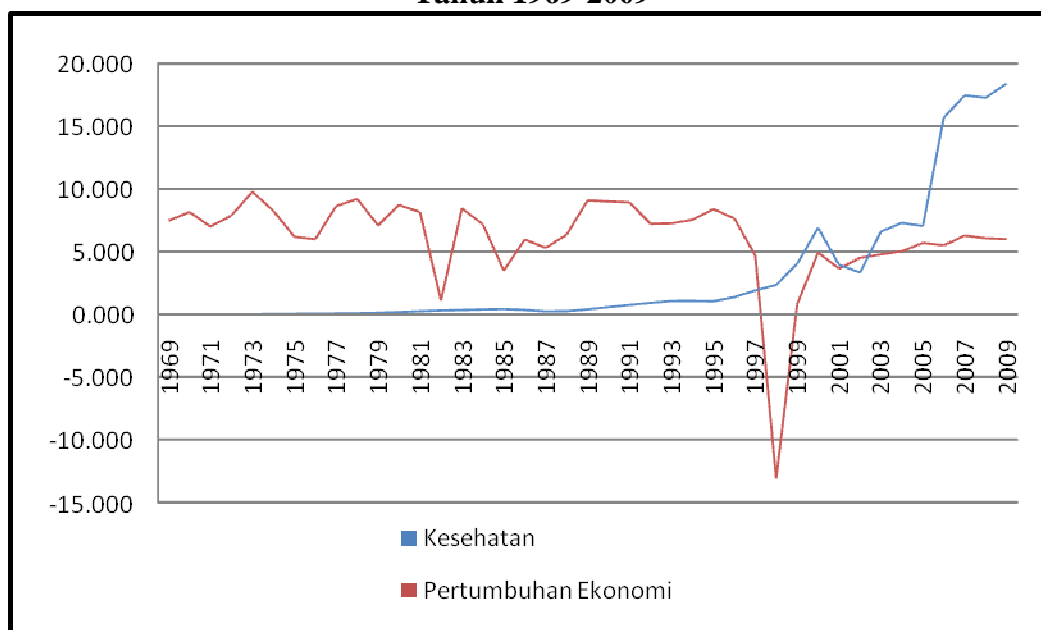
Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Anggaran sektor kesehatan memang selalu lebih kecil daripada sektor pendidikan, namun sejak tahun 2001 pengeluaran

pemerintah atas kesehatan terus meningkat. Periode tahun 1969-1995 anggaran pemerintah atas sektor kesehatan cenderung konstan. Pemerintah orde baru kala itu tidak banyak mengeluarkan kebijakan di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan hanya terpusat pada kota-kota. Pada pemerintahan orde baru tidak banyak program kesehatan dicanangkan selain program keluarga berencana dan beberapa pengentasan penyakit menular. Periode setelah krisis 1997/1998 merupakan momentum perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun mengalami penurunan hingga 3 persen dari tahun sebelumnya, namun setelah krisis pemerintah mengeluarkan program-program terkait perbaikan sektor kesehatan. Hal ini kemudian meningkatkan pengeluaran pemerintah atas kesehatan hingga 5 persen yaitu 2.333.981.318,75 rupiah pada tahun 1998 dan meningkat hingga 4.013.122.568,75 rupiah pada tahun 1999/2000.

Terkait dengan terjadinya bencana alam di beberapa provinsi seperti Tsunami di NAD dan gempa bumi di DIY dan bagian timur Indonesia pemerintah terus mengalokasikan anggaran kesehatan yang lebih besar sejak tahun 2005. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana. Sejak tahun 2004, pemerintah menetapkan program Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Program ini mulai berjalan baik sejak 2005 dan telah membantu

masyarakat miskin memperoleh pengobatan. Program ini membuat pemerintah terus meningkatkan anggaran hingga 2 persen setiap tahunnya.

**Grafik 4.4**  
**Pengeluaran Pemerintah Atas Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 1969-2009**



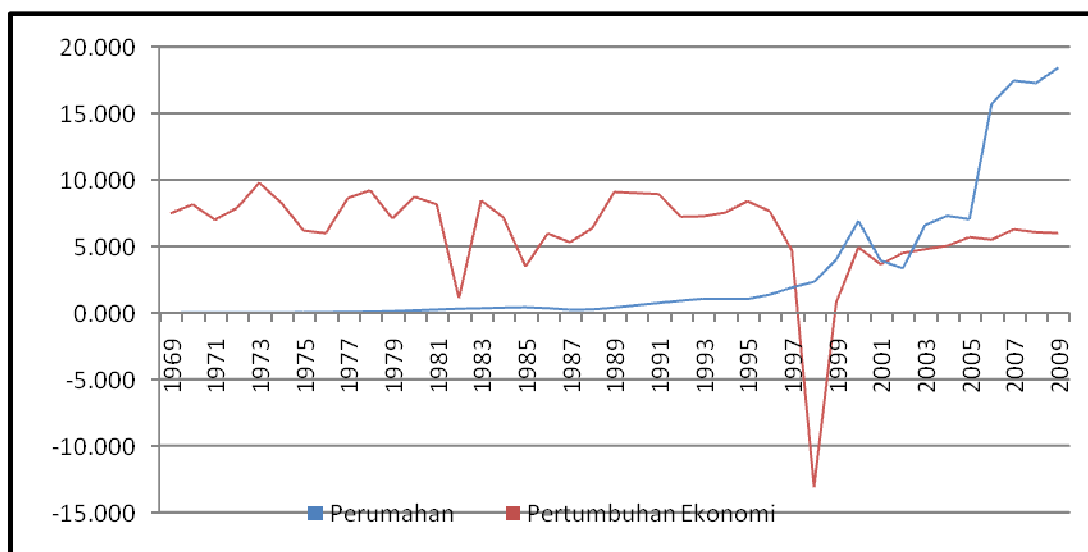
Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Badan Kebijakan Fiskal-Departemen Keuangan

#### 4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan bagian integral dari pembangunan di Indonesia. Infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Penelitian ini membahas sektor infrastruktur kedalam dua bidang, yaitu perumahan dan transportasi.

Perumahan dan transportasi merupakan pemenuhan dasar kebutuhan Infrastruktur di Indonesia.

**Grafik 4.5**  
**Pengeluaran Pemerintah Atas Perumahan dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 1969-2009**



i

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Badan Kebijakan Fiskal-Departemen Keuangan

Grafik 4.5 menunjukkan perkembangan pengeluaran atas perumahan yang memiliki tren yang cenderung konstan dari tahun 1969-1996. Pada masa pemerintahan orde baru pembangunan perumahan hanya terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia yaitu pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Tahun 1997/1998 terdesak gelombang reformasi yang menginginkan perbaikan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor termasuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk sektor perumahan hingga mencapai 7.942.000.000 ribu rupiah pada tahun 2001, nilai

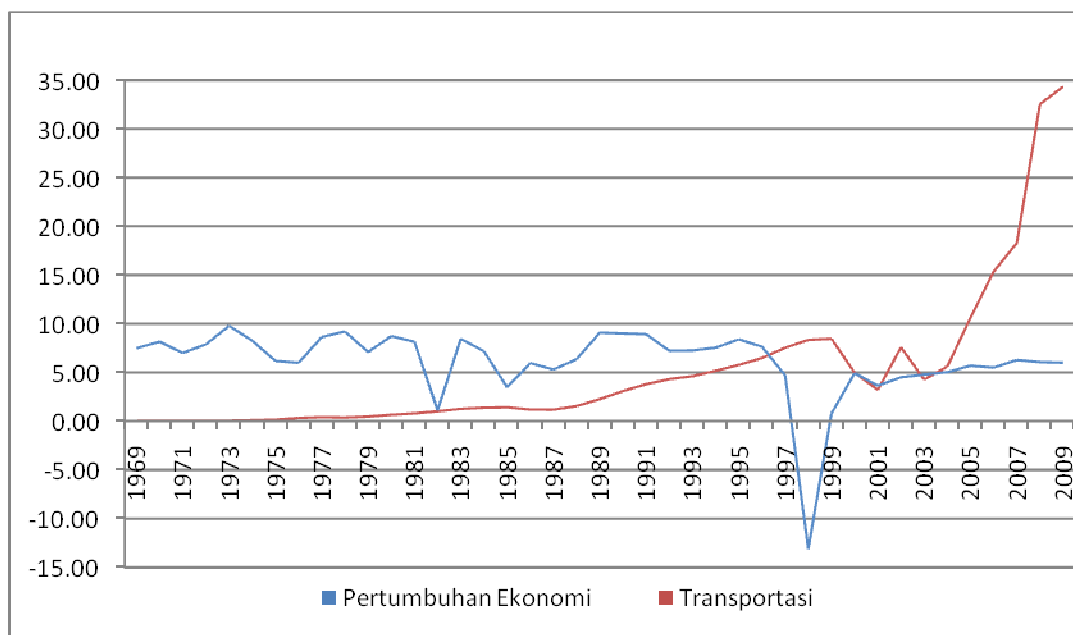
tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.681.555.318,75 ribu rupiah. Namun di tahun 2002 menurun sekitar 5 persen, selanjutnya kembali meningkat tajam di tahun 2003 hingga mencapai 18,525 triliyun rupiah.

Kenaikan ini menyangkut bencana banjir dan gempa bumi di beberapa provinsi sehingga banyak perumahan yang perlu dibangun kembali. Tahun 2008 terjadi gejolak krisis keuangan global, anggaran pengeluaran pemerintah sektor perumahan menurun tajam hingga 7 persen. Saat itu pemerintah lebih mengalokasikan dananya untuk mengamankan sektor keuangan sehingga harus ada pengeluaran yang dikurangi.

Selanjutnya bagian dari sektor infrastruktur adalah transportasi, tidak jauh berbeda perkembangannya dari sektor perumahan. Perkembangan pengeluaran pemerintah atas transportasi dapat terlihat pada grafik 4.6. Perkembangan pengeluaran atas transportasi yang memiliki tren yang cenderung konstan dari tahun 1969-1996. Pada rentang periode tersebut pemerintah banyak mengalokasikan pengeluaran transportasi untuk pembangunan jalan di pulau Jawa. Pengeluaran pemerintah atas transportasi mulai mengalami pergerakan yang fluktuatif setelah periode krisis 1999. Kenaikan tertinggi dari pengeluaran transportasi ini terjadi pada tahun 2005, hingga mencapai 22,803 triliyun rupiah. Pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan perbaikan infrastruktur transportasi khususnya daerah

terpencil. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 dan meningkat kembali hingga tahun 2009.

**Grafik 4.6**  
**Pengeluaran Pemerintah Atas Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 1969-2009**



Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Badan Kebijakan Fiskal-Departemen Keuangan

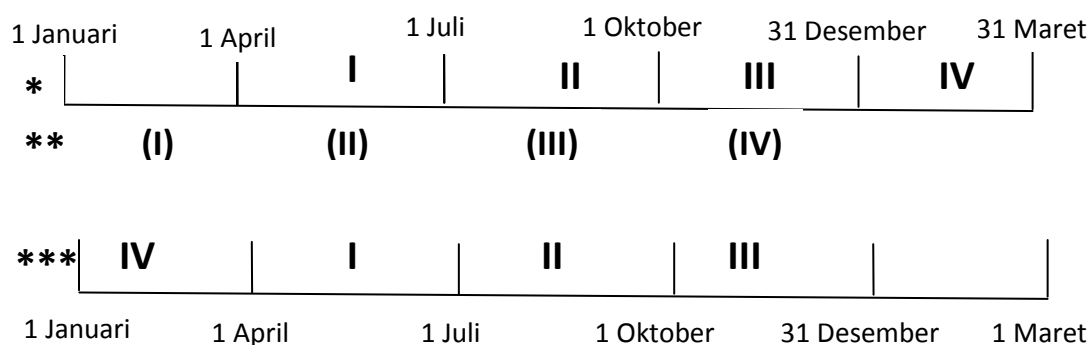
### 4.3 Analisa Data

Data mentah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 1969-2009. Karena periode tahun yang berbeda pada data yaitu antara tahun fiskal dengan tahun kalender maka dilakukan interpolasi data untuk menyamakan periode. Pada tahun 1969/1970-1999/2000, tahun anggaran yang digunakan adalah tahun fiskal(1April-31maret) dan pada tahun 2000-2006 tahun anggaran yang digunakan berubah menjadi tahun kalender (1 Januari - 31 Desember). Untuk

menyamakan periode maka hasil kuartalan pada data tahun 2000-2009 digeser untuk menyesuaikan dengan hasil kuartalan pada tahun 1969/1970-1999/2000. Kemudian hasil kuartalan pada bagian \*\*\* dijumlahkan sehingga menghasilkan periode yang sama dengan tahun anggaran 2000.

**Gambar 4.1**

**Skema Perubahan Tahun Anggaran Fiskal Menjadi Tahun Kalender**



Keterangan:

\* Tahun fiskal (1 April-31 Maret)

\*\* Tahun Kalender (1 Januari-31 Desember)

\*\*\* Penyesuaian kuartal pada tahun kalender mengikuti kuartal pada tahun fiskal

### 4.3.1 Uji Stasioneritas

Dalam menggunakan metode ECM sebelum melakukan uji kointegrasi, pertama-tama perlu dilakukan uji stasioneritas atau uji akar unit dari data dengan menggunakan *Phillips-Perron test* (PP test), dimana jika nilai probabilita lebih kecil dari alpha 5 persen maka data tersebut stasioner. Dengan cara yang sama, uji derajat integrasi juga akan dilakukan jika data

ternyata belum stasioner pada level. Hasil uji akar unit dan uji derajat integrasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji PP**

Variabel	Level		1 <sup>ST</sup> Difference		2 <sup>ST</sup> Difference		Ordo of Integration
	PP	Prob	PP	Prob	PP	Prob	
<b>PDB</b>	4.01	0.999	-2.855	0.0600	-9.667	0.0000	I(2)
<b>Pendidikan</b>	6.899	1.000	-2.451	0.1349	-13.819	0.0000	I(2)
<b>Kesehatan</b>	1.604	0.9993	-5.872	0.0000	-9.597	0.0000	I(2)
<b>Rumah</b>	-0.989	0.7479	-8.664	0.0000	-37.559	0.0001	I(2)
<b>Transportasi</b>	3.014	1.000	-4.979	0.0002	-12.494	0.0000	I(2)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 6, Lampiran 2

Pada tabel 4.2 di atas nampak bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan PDB belum stasioner dalam level, kemudian dilakukan uji derajat integrasi ke-1 (1<sup>ST</sup>Difference). Hasil uji derajat integrasi tingkat pertama terlihat bahwa tiga variabel yang pada 1<sup>ST</sup>Difference sudah stasioner namun variabel PDB dan pengeluaran pemerintah atas pendidikan belum stasioner, untuk itu diperlukan uji derajat integrasi tingkat kedua. Hasil uji derajat integrasi ke-2 (2<sup>ST</sup>Difference) terlihat bahwa semua variabel yang diambil dalam penelitian ini telah stasioner.

Apabila derajat kombinasi linier dari variabel-variabel tersebut stasioner, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut berkointegrasi. Untuk mengetahui hubungan kointegrasi tersebut, maka dilakukan uji kointegrasi.

### 4.3.2 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa semua variabel yang digunakan dalam model memiliki derajat integrasi yang sama. Dari hasil pengujian seluruh data dalam penelitian ini memiliki derajat integrasi yang sama, yaitu berintegrasi  $I(2)$ . Oleh karena itu maka uji kointegrasi dapat dilakukan.

Berikut ini akan disajikan hasil uji kointegrasi dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *residual based test* dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Kointegrasi**

PP t-stat	Critical Values		Prob	Keterangan
<b>-4.08414</b>	1% level	-3.605593	0.0028	Terkointegrasi
	5% level	-2.936942		
	10% level	-2.606857		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 6, Lampiran 3

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa kointegrasi antara variabel-variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini. hal tersebut dapat dibuktikan melalui tingkat signifikansi probabilitas dari nilai residualnya yang lebih kecil dari nilai kritis 5 persen. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai PP t-stat yang lebih besar dari *Critical Values*, sehingga data terkointegrasi pada  $I(0)$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling berkointegrasi. Oleh sebab itu model ini

lolos dari uji kointegrasi maka *Error Correction Model* dapat digunakan dalam penelitian.

### 4.3.3 Hasil Estimasi Model Jangka Panjang

Setelah diketahui bahwa variabel dependen dan variabel independen saling berkointegrasi, yang berarti terdapat keseimbangan dalam jangka panjang antar variabel tersebut. Ringkasan hasil estimasi koefisien jangka panjang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka Panjang**  
**Metode Error Correction Model**

Variabel	Koefisien	Std Error	t-stat	Prob
<b>Konstanta</b>	492017.8	75761.95	6.494	0.0000*
<b>Pendidikan</b>	-9.902439	16.86977	-0.586	0.5609
<b>Kesehatan</b>	47.18781	46.01746	1.025	0.3120
<b>Rumah</b>	40.20964	15.08553	2.665	0.0114*
<b>Transportasi</b>	125.9032	24.26506	5.188	0.0000*
		<b>F Stat</b>	125.0477	
<b>R<sup>2</sup></b>	0.932860	<b>Prob (F-stat)</b>	0.000000*	

Keterangan : \* = signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan Eviews 6, lampiran 4

#### 4.3.3.1 Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Panjang

#### 4.3.3.2 Uji Statistik Analisis Regresi Jangka Panjang

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi t-statistik. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Parameter

suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel atau dapat juga dilihat dari nilai probabilitas  $t$ -statistik yang lebih kecil dari alpha 1 persen, 5 persen atau 10 persen. Dalam penelitian ini digunakan alpha dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,684.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hanya variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan (R) dan transportasi (T) yang signifikan dalam model ini, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari alpha 5 persen dan  $t$  hitungnya lebih besar dari  $t$  tabel. Selain itu, variabel R juga memiliki koefisien yang positif sebesar 40.20964 sehingga setiap kenaikan variabel R akan disertai kenaikan PDB Indonesia. Secara keseluruhan hal ini memiliki arti bahwa setiap penambahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah atas perumahan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 40.20964 milyar rupiah dan berpengaruh secara nyata pada tingkat kepercayaan 5 persen.

Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan dan memiliki koefisien yang positif sebesar 125.9032 sehingga setiap kenaikan pengeluaran pemerintah atas transportasi akan disertai dengan kenaikan PDB. Hal ini berarti setiap penambahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah atas transportasi sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 125.9032 milyar rupiah.

Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan (P) tidak signifikan berpengaruh terhadap PDB Indonesia karena memiliki probabilitas 0.5609 yang lebih besar dari alpha 5 persen, selain itu nilai  $t$ -stat dari P adalah -9.902439.

Nilai t-stat tersebut lebih kecil dari t tabel yang bernilai 1,684. Variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan (K) juga tidak signifikan berpengaruh terhadap PDB Indonesia karena probabilitas 0,3120 lebih besar dari alpha 5 persen dimana nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah atas kesehatan adalah 47.8781. Dapat juga dilihat dari nilai t hitungnya, yaitu bernilai 1,025 yang lebih kecil dari t-tabelnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- **Uji Signifikansi Parameter (Uji F)**

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Jika nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel atau jika nilai probabilitas F-stat lebih kecil dari alpha 5 persen berarti bahwa secara bersama-sama variabel yang terdapat dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa variabel independen (pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 125,047 yang lebih besar dari F tabel yang sebesar 8,59 dimana nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari alpha 5 persen. Dari kedua pembuktian tersebut, maka model jangka panjang dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia atau

dengan kata lain secara keseluruhan variabel independennya mampu menerangkan variabel dependen secara signifikan.

- **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.93286. Hal ini berarti sebesar 93,28% variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijelaskan dari variasi ke empat variabel independen. Sedangkan sisanya 7,82% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

#### 4.3.4 Hasil Estimasi Model Regresi Jangka Pendek

Setelah mengetahui hasil estimasi jangka panjang, maka perlu diketahui bagaimana hasil estimasi model regresi jangka pendek. Model regresi jangka pendek dalam penelitian ini menggunakan differensi pertama dan menggunakan variabel *Error Correction Term* (ECT).

**Tabel 4.9**  
**Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka pendek**  
**Metode Error Correction Model (ECM)**

Variabel	Koefisien	Std Error	t-stat	Prob
Konstanta	48816.51	44489.57	1.097257	0.2802
DP	28.70671	14.53616	1.974849	0.0565
DK	12.71702	32.81134	0.387580	0.7007
DR	1.765052	14.97365	0.117877	0.9069
DT	40.15651	19.51491	2.057735	0.0473*
Error Correction Term (ECT)	0.366149	0.139016	2.633871	0.0126*
		<b>F Stat</b>	6.107601	
<b>R<sup>2</sup></b>	0.497100	<b>Prob (F-stat)</b>	0.000188*	

Keterangan : \* = signifikan pada alpha 5 persen

Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan Eviews 6, lampiran 5

##### 4.3.4.1 Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Pendek

###### 1. Uji Normalitas

Ringkasan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque Bera* dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Uji Jarque-Berra Model Jangka Pendek**

J-B hitung	Prob
160.2812	0,000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 6, Lampiran 5

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas J-B hitung persamaan lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa residual  $u_t$  tidak terdistribusi normal. Dalam penelitian ini tetap bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) karena faktor jumlah observasi yang cukup panjang yaitu 41 tahun sehingga kemungkinan data tidak terdistribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan Uji *White Heteroscedasticity-Consistent Standar Error and Covarian*. Dari tabel white diketahui bahwa *Obs\*R-squared* sebesar 32,405 sedangkan  $\chi$  tabel nilainya 55,758. Dari perbandingan ini, persamaan yang dipakai dalam penelitian diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedasitas.

## 3. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.11**  
**Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation Model Jangka Pendek**

Obs*R-squared	Probabilitas
6.943323	0.3261

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 6, Lampiran 5

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa probabilitas Chi-square (2) lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi dalam model jangka pendek.

#### 4. Uji Multikolinearitas

*Auxilliary Regression* digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas. Jika nilai  $R^2$  regresi utama lebih tinggi daripada nilai  $R^2$  regresi parsial, maka dikatakan tidak terdapat multikolineritas dalam jangka panjang. Hasil uji multikolinearitas menggunakan *Auxilliary Regression* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.12**  
**Auxilliary Regression Model Jangka Pendek**

Regresi	$R^2$
Regresi Utama	0.497100
Regresi Parsial Pendidikan	0.623904
Regresi Parsial Kesehatan	0.426379
Regresi Parsial Rumah	0.222990
Regresi Parsial Transportasi	0.476358
Regresi Parsial ECT	0.335132

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 6, Lampiran 5

Dari tabel diatas hanya variabel pengeluaran atas pendidikan yang memiliki  $R^2$  regresi parsial lebih besar daripada  $R^2$  regresi utama sedangkan variabel lain memiliki  $R^2$  regresi parsialnya lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

#### 4.3.4.2 Uji Statistik Analisis Regresi Jangka Pendek

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa untuk persamaan yang diambil dalam penelitian ini dalam jangka pendek, differensi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah terhadap transportasi (T) secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui tingkat PDB pada tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini terlihat dari probabilitas t-statistik dari variabel tersebut yang lebih kecil dari alpha 5 persen, dimana probabilitas t-statistik (D(T)) 0.0473. Ketiga variabel lain yaitu differensi pertama pengeluaran pemerintah atas pendidikan(D(P)), pengeluaran pemerintah atas kesehatan (D(K)) dan perumahan (D(R)) tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dilihat dalam tabel diatas probabilitas t-statistik dari ketiga variabel tersebut nilainya 0.0565, 0.7007 dan 0.9069, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Dapat juga dilihat dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabelnya.

Differensi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan pada alpha 5 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah atas transportasi sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 40.15651 milyar rupiah. Sedangkan differensi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana nilai koefisiennya adalah 12.71702. Dalam jangka pendek, differensi pertama dari

variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan perumahan juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koefisien *error correction term* (ECT) untuk persamaan yang diambil menghasilkan tanda yang diharapkan, yaitu bertanda positif dan secara statistik signifikan pada alpha 5 persen, dimana nilai koefisiennya positif 0.366149. Hal tersebut mempunyai makna bahwa kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*) variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi adalah sebesar 36,61persen dan akan disesuaikan dalam waktu satu tahun.

- **Uji Signifikansi Parameter (uji F)**

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa differensi pertama dari variabel independen (pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistik yaitu 0,000478 yang lebih kecil dari alpha 5 persen.

- **Koefisien Determinasi**

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.497100. Hal ini berarti sebesar 49,71% variasi pertumbuhan ekonomi

Indonesia bisa dijelaskan dari variasi ke empat variabel independen.

Sedangkan sisanya 51,39% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

#### 4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan *Error Correction Model* untuk mengetahui perilaku jangka pendek maupun perilaku jangka panjang dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah PDB Indonesia, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah atas pendidikan , kesehatan, perumahan dan transportasi.

Dari keempat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang signifikan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan ,kesehatan dan perumahan tidak signifikan, hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari alpha 5 persen. Sehingga dalam penelitian ini variabel PDB dalam jangka pendek hanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas transportasi.

Dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 DY = & 48816.51 + 28.70671DP + 12.71702DK + 1.765052DR + 40.15651DT + \\
 & (0.2802) \quad (0.0565) \quad (0.7007) \quad (0.9069) \quad (0.0473)* \\
 & 0.366149ECT \\
 & (0.0126)*
 \end{aligned}$$

Keterangan:

\* : signifikan pada alpha 5 persen.

- DY :Differensiasi pertama dari variabel PDB Indonesia
- DP : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan
- DK : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan
- DR : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan
- DT :Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi
- ECT : *Error Correction Term*

Angka dalam kurung menunjukkan nilai probabilitas t-statistik.

Sedangkan dalam jangka panjang, hanya variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi yang signifikan terhadap variabel dependen PDB Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak signifikan karena memiliki probabilitas signifikan yang lebih besar dari alpha 5 persen. Sehingga dalam penelitian ini variabel PDB dalam jangka panjang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi.

Berikut ini adalah persamaan matematis penelitian :

$$Y = 492017.8 - 9.902439P + 47.18781K + 40.20964R + 125.9032T$$

(0.0000)\*      (0.5609)      (0.3120)      (0.0114)\*      (0.0000)\*

Keterangan :

\* : signifikan pada alpha 5 persen.

Y : PDB Indonesia

P : Pengeluaran pemerintah atas pendidikan

K : Pengeluaran pemerintah atas kesehatan

R : Pengeluaran pemerintah atas perumahan

T : Pengeluaran pemerintah atas transportasi

Angka dalam kurung menunjukkan nilai probabilitas t-statistik

Dalam jangka pendek maupun panjang konstanta memiliki nilai positif, hal ini memiliki arti bahwa jika variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka ada kecenderungan untuk peningkatan PDB. Hal ini sesuai karena PDB tidak hanya terdiri dari pengeluaran pemerintah tetapi juga oleh penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah dapat meningkatkan PDB Indonesia.

#### **4.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka pendek tidak signifikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi hasil penelitian tidak menunjukkan kesesuaian teori dimana pengeluaran pemerintah atas pendidikan seharusnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka panjang tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memiliki probabilitas t statistik yang lebih besar dari alpha 5 persen. Hasil tersebut bermakna bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini

berbeda dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas pendidikan meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori human capital bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk kemudian selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini hasilnya berkebalikan dengan teori yaitu pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda juga hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) bahwa pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Ari Widodo (2010) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah atas sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain. Periode penelitian yang hanya 41 tahun mungkin belum dapat mengakomodir pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan. Selain itu pengeluaran pemerintah atas pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan di sektor pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja

yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Setelah itu produktifitas akan meningkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Josaphat P Kweka dan Oliver Morrissey (1999) dalam Luki Alfirman (2006) di Tanzania Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan Dampak negatif disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania. Jurnal penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa di negara miskin dan negara sedang berkembang memiliki kecenderungan pengeluaran pada sektor publik seperti pendidikan bersifat konsumtif. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bila dicermati melalui data pengeluaran pemerintah atas pendidikan periode 1969-2009 (grafik 4.3) tren pengeluaran pemerintah ini cenderung konstan sejak tahun 1969-1996 kemudian meningkat drastis pada tahun 1998 dan sesudahnya. Tahun 1969-1997 masa pemerintahan orde baru, anggaran pendidikan sangat rendah, hanya sekitar 2-3 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan. Pemerintah kala itu tidak banyak menunjukkan program perbaikan pendidikan. Hal ini berakibat pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kemudian tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Setelah era reformasi tahun 1998,

terjadi perombakan pemerintahan begitu pula dengan anggaran APBN, pemerintah mulai memusatkan perhatian pada sektor pendidikan. Salah satu kebijakan yang cukup nyata adalah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 10 persen dari keseluruhan APBN seperti yang tercantum pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan dalam jangka pendek memiliki arah hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak signifikan, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Seharusnya menurut teori hubungan pengeluaran pemerintah atas kesehatan di negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah atas kesehatan memang belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena proses perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat langsung terlihat pengaruhnya. Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah

mengeluarkan sejumlah anggaran pembangunan untuk kesehatan hingga kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam jangka panjang, variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan memiliki arah hubungan yang positif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari probabilitas t-statistik yang lebih besar dari alpha 5 persen. Berarti pengeluaran pemerintah atas kesehatan memerlukan waktu lebih lama untuk dapat secara langsung mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil yang penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan dapat juga berarti rendahnya keefektifan anggaran pemerintah dalam realisasinya.

Tren yang ditunjukkan oleh data pengeluaran pemerintah atas kesehatan pada Tabel 4.3 awalnya stabil kemudian meningkat tajam. Pada tahun 1969-1996 pengeluaran pemerintah atas kesehatan stabil, pemerintah orde baru hanya mensyaratkan 2-3 persen proporsinya terhadap pengeluaran pembangunan. Jumlah tersebut sangatlah minim bila dibandingkan dengan keadaan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Setelah tahun 1998 yaitu periode reformasi, pemerintah merestrukturisasi anggaran pada sektor-sektor

publik. Salah satunya tahun 2005 pemerintah mencanangkan program JAMKESMAS yaitu jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Program ini menaikkan proporsi anggaran pemerintah atas kesehatan hingga 8 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan. Selama 27 tahun (1969-1996) proporsi anggaran pengeluaran pemerintah atas kesehatan sangat kecil, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga pengaruhnya tidak secara nyata terlihat pada pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terjadi pada hasil penelitian ini yang menyatakan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) pada 58 negara Asia dan Afrika. Pengeluaran pemerintah atas kesejahteraan atau dalam kaitannya dengan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjelasan dalam penelitian tersebut menyebutkan untuk negara miskin dan sedang berkembang sifat pengeluaran pemerintah atas sektor publik bersifat konsumsi bukan investasi sehingga dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

#### 4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Variabel pengeluaran pemerintah atas sektor infrastruktur dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari sektor perumahan dan transportasi. Variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dalam jangka pendek tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari probabilitas t-statistik yang lebih besar dari alpha 5 persen. Namun hubungannya tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah atas infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian teori. Penelitian yang dilakukan World Bank (2004) mengemukakan bahwa rendahnya investasi dapat disebabkan oleh rendahnya ketersediaan infrastruktur sehingga integrasi ekonomi tidak terwujud dan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi dalam jangka pendek signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan hipotesis. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembanguanman ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur juga menunjukkan

seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan mampu melakukan pemerataan pembangunan pasti dapat melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya.

Pengeluaran pemerintah atas perumahan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Temuan hasil ini dikarenakan proyek pembangunan infrastruktur di negara sedang berkembang seperti Indonesia banyak yang tidak dapat terselesaikan dalam jangka pendek. Beberapa proyek penyediaan perumahan yang dibiayai dari anggaran pemerintah bagi masyarakat berlangsung lebih dari 10 tahun. Hal ini berimbas pada kelambanan pengaruh pada sektor-sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya signifikan karena memiliki probabilitas t statistik yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Hasil tersebut bermakna bahwa pengeluaran pemerintah atas perumahan berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas infrastruktur meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi dalam jangka panjang dan jangka pendek memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya signifikan karena memiliki probabilitas t statistik yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Hasil tersebut bermakna bahwa pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas infrastruktur meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989) Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Barang publik yang dimaksud dapat berupa penyediaan infrastruktur berupa transportasi dan perumahan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan beberapa uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengujian akar-akar unit (unit roots), kointegrasi, uji asumsi klasik yang menunjukkan bahwa data stasioner pada derajat kedua, lolos uji kointegrasi, dan menghasilkan estimator yang bersifat BLUE walaupun mengalami masalah dalam multikolinearitas.
2. Hasil regresi dengan menggunakan model koreksi kesalahan atau *error correction model* diperoleh koefisien dari *error correction term* (ECT) sebesar 0.366149 yang signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*) variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi adalah sebesar 36,61 persen dan akan disesuaikan dalam waktu satu tahun.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.93286 pada jangka panjang dan 0.49710 pada jangka pendek yang memberikan arti bahwa variasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 93,28 persen pada jangka panjang dan 49,71 pada jangka pendek.

4. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi, sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak signifikan berpengaruh. Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak berpengaruh.
5. Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran atas kesehatan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek.
6. Proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi hanya berkisar antara 3-7 persen pada tahun 1969-1996, kemudian mulai meningkat tajam sejak tahun 1998.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyaknya variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini tidak dapat langsung mempengaruhi variabel dependennya, maka diperlukan adanya variabel moderating dan intervening untuk mengakomodir masalah pengaruh tersebut. Variabel-variabel tersebut misalkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka melek huruf dan indikator-indikator lain dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperbaiki keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini.

### 5.3 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan dalam jangka panjang. Perlu ditingkatkan investasi swasta dalam sektor perumahan dan transportasi sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas perumahan dan jaringan transportasi yang baik bagi masyarakat.
2. Jangka pendek, pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jaringan transportasi antar daerah terutama daerah terpencil lebih diutamakan sehingga dapat berperan serta dalam pemerataan pembangunan.
3. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel lain sebesar 93 persen pada jangka panjang dan 38 persen pada jangka pendek, maka dalam model pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbuka untuk dikembangkan dengan menambahkan variabel lain.

4. Variabel-variabel pada penelitian ini tidak dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maka disarankan untuk melakukan pengujian dengan model lain, misalnya regresi dengan moderating dan intervening.
5. Proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah menyebabkan kelambanan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu meningkatkan proporsi pengeluaran atas pendidikan dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Dabe, Suleiman and Aamer S, 2003. "Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria." <http://ssrn.org/-163>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.
- Adi Widodo, 2010. " Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia". Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro
- Anggito Abimanyu, (Eds).2009, *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kompas
- Anton Hermanto Gunawan. 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Badan Pusat Statistik, 2005. *Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta
- Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan. Berbagai tahun. Nota Keuangan dan APBN Indonesia . Jakarta
- Baum, Donald N and Shuanglin Lin. 1993. "The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defense" *Journal of Economic Development*, Vol 18 No.1 h.175-185
- Deni Friawan. 2008, "Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia" CSIS Vol.37. No.2 Juni 2008. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dumairy 1999, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Estache, Antonio dkk. 2007. "Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Government." World Bank Policy Research Working Paper 4219. <http://ssrn.org/id981827>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.
- Firmansyah. 2009. "Modul praktek Regresi Data Panel dengan Eviews6", Modul disajikan dalam Seri 13 Pelatihan LSKE FE Universitas Diponegoro, Semarang 29 Mei 2009

- Frans, Sena. 2009. dalam *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kompas
- Gujarati, Damodar. N. 2003, *Basic Econometric Fourth Edition*. New York : The McGraw-Hill Companies Inc
- Guritno Mangkoesobroto, 1997, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Insukindro, 1992, "Pembentukan Model Dalam Penelitian Ekonomi". *Jurnal ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No.1, tahun VII, BPFE-UGM
- Jamzoni Sodik. 2007. "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 , No. 1, h.27-36 Universitas Islam Indonesia
- Lipsey, Richard G. 1992. *Pengantar Makro Ekonomi Edisi 8*. Jakarta: Erlangga
- Luki Alfirman dan Edy Sutirno. 2006. *Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression*. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.4, No.2 h.25-66. Jakarta
- Mankiw, N. Gregory, 2003, *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga
- Mudrajad, Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Musgrave, Richard A. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Jakarta: Erlangga
- Nopirin, 1990, *Ekonomi Moneter: Buku 1&2* BPFE, Yogyakarta
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga
- Saez Marta Pascual and Santiago Álvarez-García, 2006. "Government Spending And Economic Growth In The European Union Countries :An empirical Approach." *JEL*, <http://ssrn.org/-id14104>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.
- Samuelson, Paul A., William D Nordhaus. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga
- Sardono Sukirno, 1996, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Soediyono, 1992, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Edisi kelima, Liberty: Yogyakarta.
- Sri Isnowati. 2002. "Error Correction Model (ECM) Sebagai Salah Satu Bentuk Pemilihan Model dalam Ekonometri." *Fokus Ekonomi*, Vol.1, Agustus 2002 Hal 182-194
- Tri Haryanto, Unggul H dan Achmad Solihin. 2005. "Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur." *Majalah Ekonomi*, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Suparmoko, 19994, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi keempat BPFE, Yogyakarta
- Tim Penyusun, 2009. *Development Countries Indicator* dalam <http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4> diakses 24 mei 2010
- Todaro, Michael P. 2006. *Pemabangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 9*. Jakarta : Erlanga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar